

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian. PMPP TNI sebagai penyelenggara *Pre-Deployment Training* (PDT).**

Operasi Penjaga Perdamaian (PKO) adalah upaya pengiriman pasukan di bawah bendera dan mandat PBB ke negara yang sedang mengalami konflik. PBB melibatkan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk membantu mengontrol dan menyelesaikan situasi konflik dengan kerjasama negara-negara yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, PKO mengikuti tiga prinsip dasar, yakni mendapatkan persetujuan dari pihak yang terlibat dalam konflik, menjaga ketidakterpikahakan, dan menggunakan kekuatan bersenjata hanya dalam membela diri serta menjalankan mandat yang telah diberikan. Tugas-tugas yang umumnya diemban oleh PKO melibatkan pemeliharaan kondisi gencatan senjata dan pemisahan pihak yang terlibat dalam konflik, pencegahan terhadap perluasan konflik, penyediaan perlindungan bagi korban sipil, terutama warga yang terdampak, dan berupaya mencapai penyelesaian konflik secara damai dan menyeluruh.

Sebelum dipindahkan ke suatu misi perdamaian, seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Penjaga Perdamaian diwajibkan menjalani Pelatihan Pra-Penugasan (*Pre-Deployment Training*). Pentingnya pelatihan ini terletak pada persiapan personel penjaga perdamaian untuk menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan karakteristik utama pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian, yaitu: multidisipliner, melibatkan banyak negara, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, dan sangat dipengaruhi oleh perubahan situasi di lapangan.

Awalnya, persiapan personel dan kontingen dilakukan oleh

Staf Operasi dan Staf Personel Mabes TNI dengan melibatkan staf lain sesuai dengan fungsinya, tanpa adanya suatu lembaga atau wadah pendidikan dan pelatihan khusus untuk menyiapkan Pasukan Perdamaian Dunia. Namun, pada tahun 2007, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) secara resmi dibentuk di Cilangkap. Tugas utama PMPP TNI adalah merencanakan dan menyiapkan personel TNI untuk penugasan, pelatihan, dan pendidikan terkait dengan tugas pemeliharaan perdamaian PBB. Dengan adanya PMPP TNI, beberapa hambatan yang sering dialami oleh personel Pasukan Perdamaian, seperti hambatan bahasa, prosedur operasi, dan pengetahuan global dapat diminimalisir.

Seiring dengan peningkatan jumlah kontingen dan personel yang dikirim dari Indonesia, Markas Komando PMPP TNI di Cilangkap dianggap tidak lagi cukup untuk menyelenggarakan pelatihan dengan jumlah personel yang besar. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Desember 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Markas Komando PMPP TNI yang baru di Sentul, Bogor. Dengan luas lebih dari 260 hektar di Desa Tangkil, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, PMPP TNI diakui sebagai yang terbesar di Asia. Tak hanya luas, tetapi fasilitasnya juga lengkap dengan standar internasional. Di dalam kompleks ini, terdapat auditorium, pusat olahraga, ruang kelas berbagai ukuran, mess untuk tamu dan prajurit, barak, tempat latihan, lapangan tembak, hingga desa simulasi. Fasilitas ini membuat PMPP TNI sering dijadikan sebagai tempat latihan oleh pasukan perdamaian dari berbagai negara.

Dari segi operasional, PMPP TNI aktif dalam menyelenggarakan perencanaan organisasi, seleksi, pemberangkatan, penerimaan, evaluasi, pelatihan, perencanaan dukungan administratif. PMPP TNI juga bertanggung jawab dalam membina kesiapan operasional dan menjalin kerja sama

internasional terkait dengan tugas pemeliharaan perdamaian dunia. Dalam hal-hal yang bersifat non-operasional untuk pengerahan pasukan, PMPP dapat berkoordinasi langsung dengan Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas Pusat PBB, New York. Hal ini menggambarkan tanggung jawab yang jelas dari PMPP TNI dalam penyelenggaraan Latihan Penyiapan Tugas bagi para *peacekeeper* Indonesia, khususnya personel TNI.

Sesuai dengan Validasi Organisasi PMPP TNI tahun 2014, PMPP TNI memiliki fungsi utama, sebagai berikut:

1. Merencanakan organisasi, menyelenggarakan kegiatan seleksi, pemberangkatan, penerimaan purna tugas, dan evaluasi pelaksanaan tugas Satgas TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda, Pengamat Militer (Milobs), Staf Militer (Milstaff), dan penugasan lainnya pada operasi pemeliharaan perdamaian dunia.
2. Merencanakan dan mengevaluasi kurikulum, materi dan pembekalan latihan penyiapan serta menyelenggarakan kegiatan latihan bersama tentang operasi pemeliharaan perdamaian dunia dengan negara lain.
3. Menyelenggarakan kegiatan latihan serta meningkatkan kemampuan perorangan dan satuan yang dipersiapkan untuk tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia.
4. Merencanakan, menyiapkan, menginventarisasi dan mendistribusikan dukungan administrasi dan logistik untuk pelaksanaan seleksi, pelatihan, pengiriman dan penerimaan personel/kontingen serta dukungan administrasi dan logistik selama tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia.
5. Menyelenggarakan pengolahan data dan informasi serta kerjasama internasional dalam bidang pemeliharaan perdamaian dunia.
6. Melaksanakan pembinaan kesiapan operasi Pasukan Siaga Operasi Pemeliharaan Perdamaian.

Indonesia sebagai anggota PBB dan negara yang aktif dalam menjaga perdamaian dunia, merasa berkewajiban untuk menyumbangkan pasukannya ke misi perdamaian PBB. Komitmen serius Indonesia terhadap perdamaian dunia terlihat dari kontribusinya yang besar, seperti pengiriman Kontingen Garuda ke berbagai lokasi misi perdamaian, termasuk Lebanon (UNIFIL), Kongo (MONUSCO), dan Afrika Tengah (MINUSCA). Dengan mempelajari beberapa sejarah konflik ketiga daerah misi tersebut, diharapkan para *peacekeeper* mengetahui akar penyebab mengapa mereka ditugaskan di daerah tersebut yaitu sebagai berikut:

#### **4.1.1. Sejarah Singkat Satgas UNIFIL di Lebanon Selatan.**

Pada awal tahun 1970-an, terjadi pertempuran antara Lebanon dan Israel yang dimulai dengan penyerangan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) terhadap Israel. Serangan ini memicu Israel untuk melancarkan operasi militer yang dikenal dengan sebutan Operasi Litani pada tanggal 14 dan 15 Maret 1978, dengan tujuan menguasai wilayah selatan Lebanon. Merespons situasi tersebut, PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 425 dan Nomor 426 pada tanggal 19 Maret 1978, yang mewajibkan menghormati kedaulatan Lebanon dan memerintahkan Israel untuk menarik pasukannya dari Lebanon.

Dalam upaya memastikan kepatuhan Israel terhadap resolusi tersebut, PBB membentuk Pasukan Perdamaian di Lebanon yang dikenal sebagai *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL). Tugas pasukan ini mencakup memastikan penarikan pasukan Israel dari Lebanon, mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional, serta memberikan dukungan kepada pemerintah Lebanon dalam mengembalikan otoritasnya di wilayah tersebut. Meskipun UNIFIL telah menjalankan tugas pemeliharaan perdamaian

di Lebanon Selatan, pada tanggal 6 Juni 1982, Israel kembali melakukan invasi ke Lebanon. Invasi tersebut dilakukan sebagai tanggapan terhadap upaya pembunuhan duta besar Israel untuk Inggris, Shlomo Argov, oleh Organisasi Abu Nidal yang terkait dengan PLO. PLO membantah keterlibatannya dalam upaya pembunuhan tersebut. Invasi Israel berlanjut dengan perintah Menteri Pertahanan Israel pada saat itu untuk memasuki Beirut Barat, menyebabkan korban jiwa yang signifikan di pihak Lebanon (Wikipedia, 2023).



Gambar 4.1.2. Peta Geografi Wilayah Lebanon

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Dalam respons terhadap situasi tersebut, pada tahun 1982, kelompok Syiah di Lebanon membentuk Hezbollah, sebuah milisi bersenjata yang bertujuan mengusir Israel dari wilayah Lebanon. Konflik antara Hezbollah dan Israel terus berlanjut, mencapai

puncaknya pada 12 Juli 2006. Pada tanggal tersebut, Hezbollah menyerang kota Shlomi di utara Israel dengan rudal Katyusha dan melakukan penyusupan ke wilayah Israel. Israel merespons serangan tersebut dengan peluncuran roket ke arah Lebanon, pengeboman oleh Angkatan Udara Israel (IAF), serta menerapkan blokade udara dan laut. Selain itu, Israel juga melancarkan beberapa serangan kecil di wilayah Lebanon Selatan selama periode 34 hari.

Dalam menghadapi ketegangan di wilayah Lebanon Selatan, Dewan Keamanan PBB merespons dengan menerbitkan Resolusi 1701 (2006). Resolusi ini bertujuan untuk menghentikan serangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sebagai bagian dari resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB meningkatkan jumlah personel pasukan perdamaian dari 2000 menjadi 15.000 personel militer. Berdasarkan mandat ini, tugas UNIFIL mencakup pemantauan penghentian perselisihan antara Israel dan Hezbollah, memberikan pendampingan dan dukungan kepada *Lebanese Armed Forces* (LAF) di wilayah Lebanon Selatan, mengawasi penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah tersebut, berkoordinasi dalam aktivitas operasi dengan pemerintah Lebanon dan Israel, memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil, membantu pengembalian orang yang terdislokasi, memberikan bantuan kepada LAF dalam membersihkan pasukan militer dari wilayah yang ditentukan oleh pemerintah Lebanon dan UNIFIL, serta mendukung pemerintah Lebanon dalam mengamankan perbatasan dan pintu masuk untuk mencegah masuknya pihak-pihak yang tidak diinginkan.

Pada tahun 2006, Pasukan Perdamaian Indonesia turut serta bergabung dengan UNIFIL dan terus menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan hingga saat ini. Kontingen Garuda (Konga) yang pertama kali dikirimkan ke Lebanon diberi sandi penugasan Kontingen Garuda XXIII-A. Demikian seterusnya hingga Kontingen

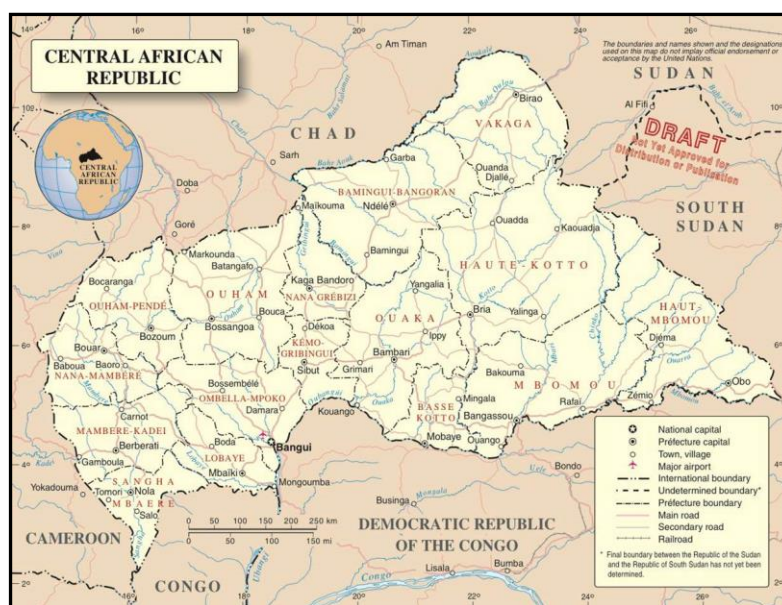
yang bertugas saat ini diberi nama Kontingen Garuda XXIII-Q. Kontingen tersebut berkekuatan satu Batalyon Mekanis, yaitu 850 orang, sehingga sering juga disebut dengan Satuan Tugas (Satgas) INDOBATT atau *Indonesian Battalion*.

#### **4.1.2. Sejarah Singkat Satgas MINUSCA di Afrika Tengah.**

Timbulnya konflik antara kelompok Islam dan Kristen terjadi saat pemberontakan militer pada tahun 1996 yang memberikan Muslim kekuasaan politik yang lebih, namun kurang mendapat simpati karena banyak dari para pemberontak yang ternyata berasal dari negara Chad dan Sudan yang memiliki maksud serta motivasi lain. Pada Maret 2013, Pemberontak Seleka menguasai ibukota dan merebut kekuasaan. Presiden Bozize yang berkuasa pada saat itu, melarikan diri. Pemimpin pemberontak Seleka yaitu Michel Djotodia menunda konstitusi dan membubarkan parlemen dalam sebuah kudeta. Gerakan tersebut dikutuk oleh pihak internasional. Hingga pada Agustus 2013, pemimpin kudeta yaitu Michel Djotodia dilantik sebagai Presiden. Dewan Keamanan PBB memperingatkan Negara Republik Afrika Tengah bahwa dengan kondisi pemerintahan pada saat itu dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas regional. Menurut Sekjen PBB Ban Ki-moon bahwa Republik Afrika Tengah telah mengalami kehancuran total hukum dan ketertiban. Setelah 10 bulan Seleka melakukan aksi dengan menyerang dan membunuh warga non muslim, umat Kristen kemudian membentuk suatu kelompok bernama Anti Balaka yang berarti pedang atau kekuatan.

Kelompok Anti Balaka kemudian mulai menyerang kelompok Seleka dan warga muslim sebagai aksi balas dendam atas kejadian sebelumnya. Konflik tersebut telah merusak toleransi beragama di Republik Afrika Tengah. Pada tanggal 11 Januari 2013, tercapai perjanjian gencatan senjata di Libreville, Gabon. Dalam perjanjian ini, pihak pemberontak menuntut agar Presiden Francois Bonzize

mengundurkan diri, dengan syarat bahwa ia harus menunjuk perdana menteri baru dari partai oposisi pada 18 Januari 2013. Namun, situasi berubah pada Maret 2013 ketika terjadi kudeta terhadap Francois Bozize oleh kelompok Seleka, yang kemudian menunjuk Michael Djotodia sebagai presiden. Pada tanggal 3 Januari 2014, juru bicara PBB untuk masalah pengungsi, Babar Baloch, mengumumkan bahwa jumlah pengungsi mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai sekitar 710.000 pada Desember 2013 dan meningkat menjadi sekitar 935.000 pada Januari 2014. Kompleksitas masalah semakin meningkat karena lembaga-lembaga kemanusiaan mengalami kesulitan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.



Gambar 4.1.3. Peta Geografi Wilayah Afrika Tengah

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Uni Afrika mengerahkan sekitar 5.000 pasukan penjaga perdamaian (MISCA) ke Republik Afrika Tengah dengan dibantu oleh 1.600 dari Prancis (OPERASI SANGARIS) sejak Desember 2013. Pasukan Uni Eropa (EUROFOR) membentuk operasi militer di

Republik Afrika Tengah untuk membantu memulihkan keamanan di negara tersebut, dibawah pimpinan Mayor Jenderal Philippe Ponties, dengan 1.000 tentara Uni Eropa yang berdislokasi di Bangui, ibu kota Republik Afrika Tengah dan kota besar lainnya. Situasi keamanan yang semakin buruk, meningkatnya korban warga sipil dan gelombang pengungsi menuju Kamerun yang tidak terkendali memaksa DK PBB untuk turun tangan dalam mengatasi kondisi tersebut dimana dengan suara bulat pada 10 April 2014 menyetujui untuk mengotorisasi hampir 12.000 pasukan penjaga perdamaian PBB untuk Republik Afrika Tengah, dengan nama MINUSCA.

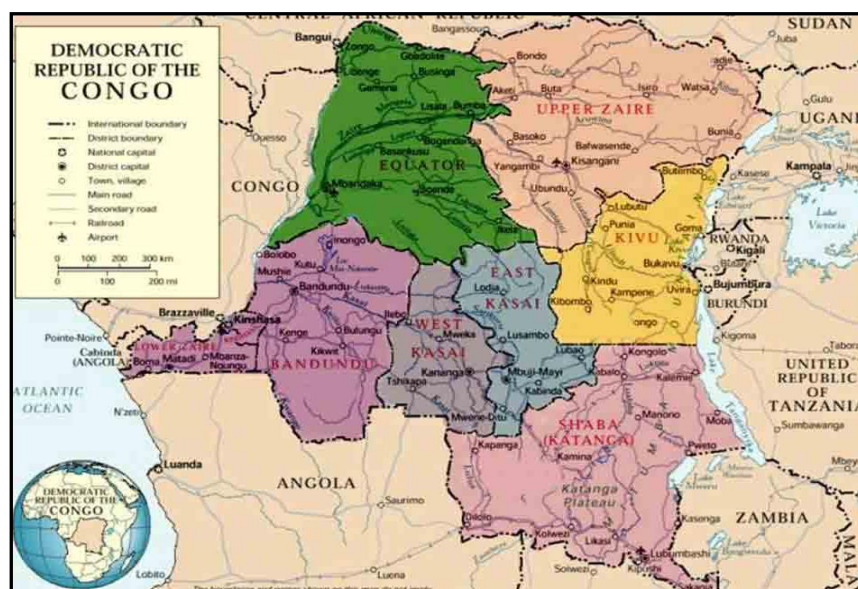
#### **4.1.3. Sejarah Singkat Satgas MONUSCO di Kongo.**

Konflik di *Great Lake Region* yang meliputi Republik Demokrasi Kongo, Rwanda dan Uganda berawal dari pertikaian etnik antara suku Hutu dan Tutsi di perbatasan Timur Republik Demokrasi Kongo dan Rwanda. Pertikaian ini menjadi konflik yang kompleks dan cenderung merongrong pemerintah Republik Demokrasi Kongo. Salah satu kelompok milisi yang dipimpin oleh Laurent Yosep Kabila dalam pertikaian berhasil menggulingkan pemerintahan Mobutu Sese Seko, Presiden Kongo, pada tahun 1997.

Pada pertengahan 1998 Kabilla menghapuskan suku Tutsi dari kewarganegaraan Kongo khususnya suku Tutsi Banyamulenge. Bersama dengan tentara Rwanda, suku Tutsi ini membentuk *Rally Congolese for Democration* (RCD) dan berhasil menguasai wilayah timur Republik Demokrasi Kongo. Tidak lama kemudian di wilayah utara Kongo kelompok pemberontak yang juga berhasil menduduki wilayah utara membentuk *Movement for Liberation of the Congo* (MLC) dengan dukungan Uganda. Kondisi ini semakin memperburuk keamanan di wilayah timur Kongo dan menyebabkan konflik semakin kompleks.

Pada bulan Mei 2003 terjadi peperangan antara suku Lendu

dan Hema di Bunia, Distrik Ituri, karena saling memperebutkan wilayah mereka dan menyebabkan 500 orang meninggal dunia. Suku-suku ini membentuk kelompok-kelompok bersenjata seperti FNI, FAPC, UPC dan PUSIC yang sampai sekarang masih mendominasi pertikaian dan memiliki wilayah konsentrasi pasukan masing-masing di Distrik Ituri, wilayah Kongo bagian timur. Sedangkan untuk wilayah Beni, kelompok milisi menyebar dari Eringeti sampai Kanyabayonga wilayah North Kivu Brigade. Konsentrasi kelompok milisi berada di daerah Butembo sampai Kanyabayonga yang merekrut suku May-May pimpinan Kolonel Jhonson.



Gambar 4.1.4. Peta Geografi Wilayah Kongo

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Dalam rangka membantu penyelesaian konflik antar etnis di Republik Demokrasi Kongo, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) telah membentuk organisasi misi perdamaian di Kongo pada tanggal 16 Juli 1999. Keputusan Dewan Keamanan PBB untuk mengirim misi perdamaian ke Republik Demokratik Kongo (DRC) didasarkan pada

"Perjanjian Lusaka." Perjanjian ini dihadiri oleh negara-negara yang secara tidak langsung terlibat dalam konflik tersebut dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat. Misi perdamaian ini, yang resmi beroperasi di Kongo pada tanggal 1 Agustus 1999, diberi nama *Mission de l'Organisation des Nations Unies République Democratique du Congo* (MONUC). Melalui beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB, seperti Resolusi No. 1533, 1552, 1555, dan 1565 tahun 2004, mandat MONUC dikonsepsikan berdasarkan Bab VII Piagam PBB tentang Tindakan Terkait Ancaman terhadap Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian, dan Tindakan Agresi. Mandat tersebut tidak hanya melibatkan operasi militer, melainkan juga melibatkan kapabilitas sipil. Perubahan mendasar dalam mandat MONUC menandai peralihan dari operasi penjaga perdamaian tradisional menjadi operasi penjaga perdamaian multidimensional dalam konflik di Kongo. Pada tahun 2010, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mengubah nama MONUC menjadi MONUSCO (*Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo*) melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1925.

## **4.2. Hasil Pengumpulan Data.**

### **4.2.1. Hasil Wawancara.**

#### **4.2.1.1. Pandangan Kemenlu RI dan ODC Kedubes Amerika Serikat tentang kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat untuk *promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations* dalam rangka menyempurnakan latihan PDT di PMPP TNI.**

Negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, memiliki kemampuan untuk menjalankan kerjasama internasional yang mendukung terciptanya keamanan dan perdamaian di tingkat global. Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan keamanan dan perdamaian

internasional. Indonesia menduduki peringkat ke-8 dalam jumlah pasukan yang dikirimkan ke misi perdamaian PBB, dengan total 2.689 personel per tanggal 31 Desember 2022 (Shafa Salsabila, 2023). Keterlibatan Indonesia melibatkan berbagai jenis pasukan, seperti *Expert of Mission, Individual Police, Staff Officer, Formed Police Units* hingga *Troops*, dan tersebar dalam sembilan misi perdamaian, antara lain UNIFIL (Lebanon), MINUSCA (Afrika Tengah), dan MONUSCO (Kongo). Dengan demikian, peran Indonesia dalam mewujudkan tujuan perdamaian internasional melalui partisipasi aktif dalam misi-misi PBB menjadi relevan dan signifikan.

**Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber Staf Direktorat KIPS Kemenlu RI bahwa:**

“Kemenlu RI memandang penting kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB. Salah satu kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang ini adalah *Global Peace Operations Initiative (GPOI)*. Melalui GPOI, Amerika Serikat membantu negara pengirim pasukan MPP PBB untuk mengadakan program pengembangan kapasitas, meningkatkan jumlah pasukan militer dan *Formed Police Unit (FPU)* untuk ditugaskan ke daerah misi, dan fasilitasi persiapan dan dukungan logistik keberangkatan ke misi. Total bantuan yang telah diberikan Amerika Serikat melalui mekanisme tersebut senilai 8 juta dollar AS dan kedua negara telah melaksanakan latihan bersama pada tahun 2008 dan 2009. Diluar mekanisme GPOI, Amerika Serikat juga telah menyalurkan bantuan untuk MPP PBB Indonesia senilai 14.8 juta dollar AS.”

**Hal yang senada juga disampaikan oleh narasumber dari Staf ODC Kedutaan Amerika Serikat bahwa:**

“Amerika Serikat telah lama mendukung upaya pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia, melalui partisipasi dalam operasi perdamaian PBB dan berbagai misi pemeliharaan perdamaian di berbagai negara termasuk Indonesia. Amerika Serikat telah memberikan bantuan dalam hal pelatihan dan peningkatan kapasitas personel militer Indonesia yang akan ditempatkan dalam misi pemeliharaan perdamaian. Ini termasuk pelatihan dalam bidang logistik, komunikasi, menyediakan peralatan, kendaraan, perlengkapan medis, dan sumber daya lain

yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas di lapangan dalam konteks misi pemeliharaan perdamaian. Saat ini selain kerja sama bilateral, Amerika Serikat dan Indonesia juga sedang mengembangkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam konteks misi pemeliharaan perdamaian di wilayah tersebut. Ini dapat memperkuat usaha-usaha untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di suatu daerah seiring berjalannya waktu dan perubahan situasi politik dan keamanan global, dengan berdasar kebijakan luar negeri saat itu dan prioritas masing-masing negara.”

Narasumber juga menambahkan, “Pendekatan untuk meningkatkan kerja sama pelatihan antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam konteks misi pemeliharaan perdamaian bisa mencakup materi *counter terrorism* jika situasi di lapangan memerlukan hal tersebut dan jika keduanya setuju. Ini akan sangat tergantung pada perkembangan situasi dan kebutuhan yang muncul selama misi pemeliharaan perdamaian. Kedutaan Amerika Serikat mungkin akan mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengevaluasi apakah pelatihan *counter terrorism* harus ditingkatkan, meliputi: jika ada perkembangan yang menunjukkan peningkatan ancaman dari kelompok bersenjata yang dianggap sebagai teroris di daerah misi, maka diperlukan peningkatan pelatihan *counter terrorism* untuk melindungi para *peacekeeper* dan memastikan keberhasilan misi, mengevaluasi kemampuan personel militer Indonesia yang akan ditempatkan dalam misi pemeliharaan perdamaian juga akan menjadi pertimbangan penting. Jika mereka memerlukan pelatihan tambahan dalam *counter terrorism*, Amerika Serikat dapat memberikan bantuan dalam hal ini, kedua pihak negara harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik untuk menentukan jenis pelatihan yang paling relevan dan efektif. Ini mungkin melibatkan pertemuan dan pembicaraan antara ODC Amerika Serikat dan pihak militer Indonesia, dan penting berikutnya adalah memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum internasional dan norma-norma misi pemeliharaan perdamaian PBB. Setiap peningkatan dalam pelatihan harus diarahkan untuk mendukung tujuan misi pemeliharaan perdamaian, yaitu menciptakan perdamaian dan stabilitas di daerah yang terkena konflik. Keputusan untuk mengadakan pelatihan *counter terrorism* harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap misi pemeliharaan perdamaian secara keseluruhan dan harus selaras dengan kebijakan internasional dan peraturan PBB yang mengatur misi tersebut.”



Gambar 4.2.1. Wawancara narasumber dari Staf ODC  
Kedutaan Amerika Serikat a.n Ibu Elly Kurniawati  
via *zoom meeting*

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Menanggapi ancaman isu terorisme, Indonesia bersikap komit untuk sepenuhnya mendukung inisiatif global dalam upaya mencegah dan menghilangkan terorisme. Upaya ini melibatkan peningkatan kapasitas serta kerja sama internasional. Indonesia juga terus menjunjung tinggi kolaborasi dengan lembaga Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk memajukan diskusi seputar penanggulangan isu terorisme.

“Namun sejauh ini kerja sama pelatihan Indonesia dengan Amerika Serikat berfokus pada pengembangan kapasitas dan fasilitasi kebutuhan logistik. Meski terdapat ancaman serangan dari kelompok bersenjata maupun teroris di daerah misi, terdapat konsensus di PBB bahwa MPP PBB bukan alat yang tepat untuk operasi *counter terrorism* karena tidak termasuk dalam mandat misi yang berfokus pada perlindungan sipil dan restorasi perdamaian. Walaupun begitu, PMPP TNI dan Pusat Misi Internasional (Pusmisinter) Polri telah menyiapkan materi fisik untuk mempersiapkan pasukan untuk membela diri kiranya ada ancaman. Dalam hal ini, kerja sama dapat ditujukan untuk pengembangan kapasitas untuk meningkatkan keahlian pasukan dalam melindungi diri dan masyarakat sipil dari ancaman kelompok teroris,” **ucap narasumber**

### **Direktorat KIPS Kemenlu RI.**

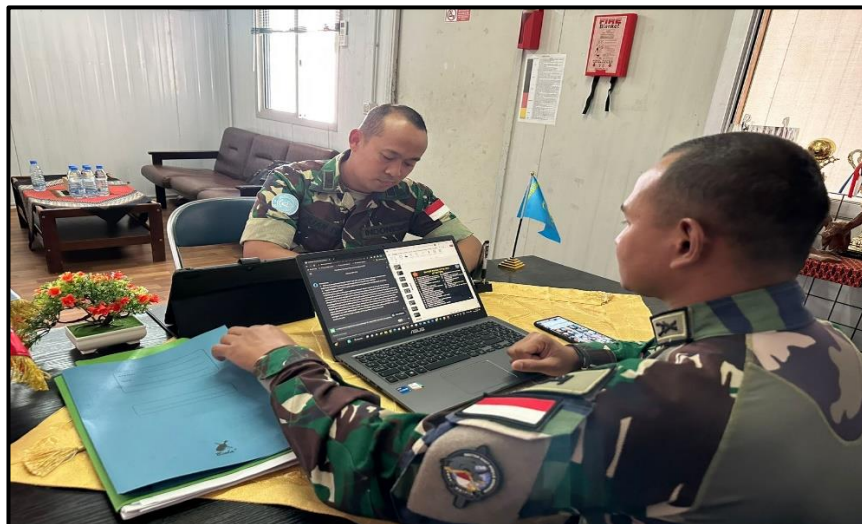
*Pre-Deployment Training* (PDT) merupakan serangkaian latihan yang diadakan untuk para penjaga perdamaian yang akan ditempatkan dalam misi pemeliharaan perdamaian. Pelatihan sebelum penugasan ini diselenggarakan oleh PMPP TNI sebagai pihak yang bertanggung jawab dan pelaksana utama. Satgas akan dibekali dengan *Core Pre-Deployment Training Materials* (CPTM), *Specialized Training Materials* (STM), dan diakhiri dengan latihan aplikasi yang mencakup simulasi tugas yang akan dihadapi di daerah misi. Berdasarkan **keterangan yang diberikan oleh para praktisi peacekeeper baik Satgas UNIFIL (Danki TF-B), MINUSCA (Wadansatgas) maupun MONUSCO (Pasiops RDB)** materi yang diberikan selama pelaksanaan PDT kurang lebih selama 1 bulan dibagi menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut:

1. Materi Pokok
  - a. *Introduction to UN Peacekeeping.*
  - b. *Fundamental Principles of UN Peacekeeping.*
  - c. *Establishment and Operationalization of Security Council Mandates in Peacekeeping Operations.*
  - d. *How United Nations Peacekeeping Operations Function.*
  - e. *International Law Relevant to Peacekeeping Operations.*
  - f. *Human Rights Protection in UN Peacekeeping Operations.*
  - g. *Women, Peace and Security.*
  - h. *Child Protection.*
  - i. *Working with Mission Partners.*
  - j. *Introduction to Conduct and Discipline.*
  - k. *Sexual Exploitation and Abuse.*
  - l. *Consequences of Misconduct.*

- m. *HIV/AIDS in UN Peacekeeping Operations.*
  - n. *Respect for Diversity.*
  - o. *Safety and Security.*
2. Materi Pendukung
- a. *Driving skill.*
  - b. Pengetahuan GPS, Ilmu Medan dan NVG.
  - c. *Basic Life Support.*
  - d. *Mine and UXO Awareness.*
  - e. *UN Communication Procedures.*
  - f. *Personel Security Awareness.*
  - g. *Background of Conflict.*
  - h. *UN Mandate.*
  - i. *UN Military Terminology and Military Symbols.*
  - j. *Contingency Planning.*
  - k. *Personal Hygiene.*
  - l. Pengetahuan Kesehatan (HIV/AIDS/Malaria).
  - m. *Casevac/Medevac.*
  - n. ROE.
  - o. *Culture Awareness.*
  - p. *Protection of Civilian.*
  - q. *Command and Control.*
  - r. UN CIMIC.
  - s. *Logistic in Peacekeeping.*
  - t. *Media Relations.*
  - u. *Personal in Peacekeeping.*
  - v. *Contingent Owned Equipment (COE).*
  - w. Menembak Pistol dan Senapan.
3. Materi Teknis
- a. Patroli (khusus Satgas MINUSCA tentang materi zeni konstruksi).
  - b. *Check Point.*

- c. *Observation Post.*
- d. *Fixed Guard and Search (UN Designated Site).*
- e. *Escort and Convoy.*
- f. *Crowd Management/Penanggulangan Huru-hara.*
- g. *Cordon and Search.*
- h. Organisasi, Prosedur Komando dan Staf.
- i. *Illegal Check Point and Hijack.*
- j. *Support Service.*
- k. Negotiation and Mediation.
- l. *Standardized Tactical Incident Reaction (STIR).*

Namun saat wawancara kepada ketiga praktisi *peacekeeper* tersebut mengenai pelatihan dengan materi *counter terrorism* masing-masing memiliki jawaban yang berbeda seperti **Danki TF-B UNIFIL menyatakan** belum pernah mendapatkan tugas terkait penanganan terorisme berdasarkan pengalaman selama kurang lebih 6 bulan di daerah misi pelaksanaan tugas lebih kepada patroli perbatasan dan mejaga stabilitas konflik di Lebanon Selatan antara Israel dan Hezbollah, namun tidak ada salahnya bila dibekali dengan materi *counter terrorism*. Berbeda dengan pandangan **Wadansatgas MINUSCA menyatakan bahwa** perlunya latihan terkait penanganan ancaman terorisme karena tidak menutup kemungkinan di daerah misi Afrika MINUSCA akan terjadi perubahan situasi. Sedangkan dari **Pasiops RDB MONUSCO menyatakan bahwa** mereka memerlukan pelatihan tersebut dan penyamaan persepsi dari UN, berikut payung hukum UN mengenai Mandat dan perubahan Resolusi UN sehingga tidak ada keraguan bagi pasukan dalam mengambil tindakan di lapangan agar tidak tersangkut hukum nantinya.



Gambar 4.2.2. Wawancara narasumber dari Danki *Task Force Bravo Indobatt Sec East UNIFIL* a.n Mayor Inf Noer Hidayat

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)



Gambar 4.2.3. Wawancara narasumber dari Wadan Satgas Kizi MINUSCA a.n Kapten Czi Bangun Prasetyo  
*via zoom meeting*

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

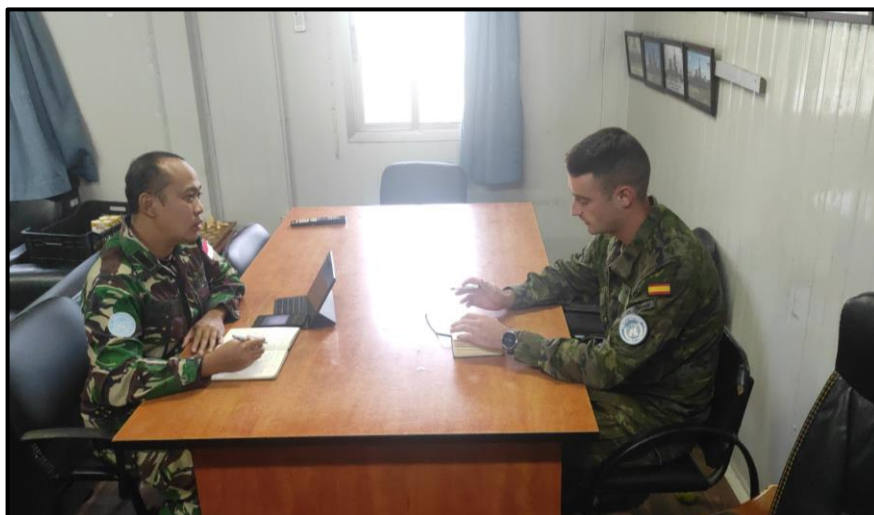


Gambar 4.2.4. Wawancara narasumber dari Pasiops Satgas RDB MONUSCO a.n Lettu Inf Reinardus Dian  
*via zoom meeting*

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Peneliti berusaha mencari pembandingan dengan praktisi *peacekeeper* dari negara lain seperti Satuan SPANBATT (*Spanish Battalion*) dan NEPBATT (*Nepal Battalion*) dimana masih dalam lingkup daerah misi UNIFIL di Lebanon dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan **keterangan yang diberikan oleh Deputy Commanding Officer Task Force-A SPANBATT 1<sup>st</sup> Lieutenant Nunnes Yagho Fernandez**: “Pasukan dari negara Spanyol mendapat latihan PDT selama 6 bulan dimana dibagi menjadi 2 bagian yaitu 4 bulan pertama belajar tentang materi umum dan 2 bulan selanjutnya tentang materi spesifik (khusus) sesuai jabatan di daerah penugasan. Pada materi umum mereka menerima pelatihan seperti mengemudi dengan medan yang berbeda mulai dari melintasi pegunungan sampai dengan medan perkotaan sesuai dengan medan di daerah operasi Lebanon (lebih detail pelatihan ini diberikan untuk korp kavaleri). Sedangkan untuk pasukan infanteri mereka menerima materi lebih dalam tentang taktik meliputi reaksi terhadap *ambush* (penyergapan), *close combat* (pertempuran jarak dekat), *counter IED/explosive device* (penanganan bom), dan menangani sisa UXO (bom yang tidak meledak). Setelah mereka melaksanakan latihan tersebut di atas secara berulang-ulang selama 4 bulan, mereka akan fokus menerima pelatihan materi khusus meliputi pengetahuan taktik, material barang-barang yang ada di daerah penugasan, dan pengetahuan khusus tentang situasi di daerah misi Lebanon. Untuk materi taktik yang diajarkan secara umum meliputi *escort* (pengawalan), reaksi terhadap *ambush* (penyergapan), menangani sisa UXO dan *explosive device*, pengamanan saat *convoy* seperti polisi militer, dan tentang materi POC (*Protection of Civilian*). Dimana tugas mereka sebagai pasukan TF-A di sektor *east* UNIFIL adalah memberikan penanganan/pemulihan secara cepat terhadap situasi di sektor *east* dan melakukan banyak patroli setiap harinya.”



Gambar 4.2.5. Wawancara narasumber dari *Deputy Commanding Officer Task Force Alpha SPANBATT Sec East UNIFIL a.n 1<sup>st</sup> Lt Nunnes Yagho Fernandez*

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

2. Berdasarkan **keterangan yang diberikan oleh *Liaison Officer QRT (Quick Response Team) NEPALBATT Captain Sushant Singbandhari*** bahwa: “Mereka mendapatkan latihan PDT selama 6 bulan dengan menerima beberapa materi meliputi *basic military skill* (latihan dasar militer), *mission specific military training* (latihan khusus misi militer), *personal conduct and dicipline* (perilaku kedisiplinan), POC (*Protection of Civilian*), WPS (*Woman, Peace and Security*), *Principles and*

*Guidances UN Operations* (prinsip dan panduan operasi di UN), *Introduction UN peacekeeping system* (pengenalan sistem kerja di UN), *Standardized Tactical Incident Reaction (STIR)* dan *Specific Training*. Pada materi *specific training* diberikan kepada masing-masing personel sesuai tugas/jabatannya agar dapat mengatasi permasalahan secara spesifik sesuai tugas/jabatannya tadi, seperti contoh untuk *Engineer* (korp Zeni) maka akan menerima pelatihan tentang materi zeni, penanganan bom/IED *maupun force protection work* (pekerjaan untuk penguatan/perlindungan seperti pembuatan bunker). Tugas dari NEPALBATT di daerah misi adalah untuk melaksanakan observasi, monitoring, dan membuat laporan terhadap situasi di daerah tugasnya di Lebanon. Apabila ada peningkatan eskalasi situasi seperti kekacauan maka akan diatasi sesuai pelatihan pada materi STIR dimana banyak situasi yang telah diperankan termasuk kekacauan misalnya pelemparan batu atau pelanggaran di perbatasan *Blue Line*.





Gambar 4.2.6. Wawancara narasumber dari *Liaison Officer* QRT (*Quick Response Team*) NEPALBATT a.n Capt Sushant Singbandhari

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Peneliti juga mencari informasi ke PMPP TNI untuk mengumpulkan data terkait latihan maupun kerja sama dalam penyelenggaraan PDT untuk para *peacekeeper* Indonesia melalui narasumber berikut:

1. Berdasarkan **keterangan narasumber dari Staflet PMPP TNI didapatkan informasi bahwa:** "Terkait seluruh latihan yang diselenggarakan PMPP adalah bermuara pada tujuan misi yaitu misi perdamaian, tidak menyebutkan misi terkait *counter terrorism*, sesuai pada spektrum misi pada item no.3 yaitu *cease fire* yang merupakan fungsi *peacekeeping*. Mandat yang terdapat pada setiap misi rata-rata sama yaitu tentang POC (*Protection of Civilian*), seperti pada mandat misi UNIFIL yaitu untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendukung LAF (*Lebanese Armed Forces*). Dalam mandat tersebut tidak ada menyebutkan tentang *counter terrorism* dan bukan tugas pokok dari pasukan Indonesia, maka PMPP TNI tidak bisa melatih materi *counter terrorism*, bila dilaksanakan maka akan menyalahi mandat yang telah diberikan UN kepada Indonesia. Sebagai pengetahuan bahwa di UN terbagi atas 2 sifat misi yaitu *offensive* (melawan dan mengejar) dan *defensive* (bertahan).

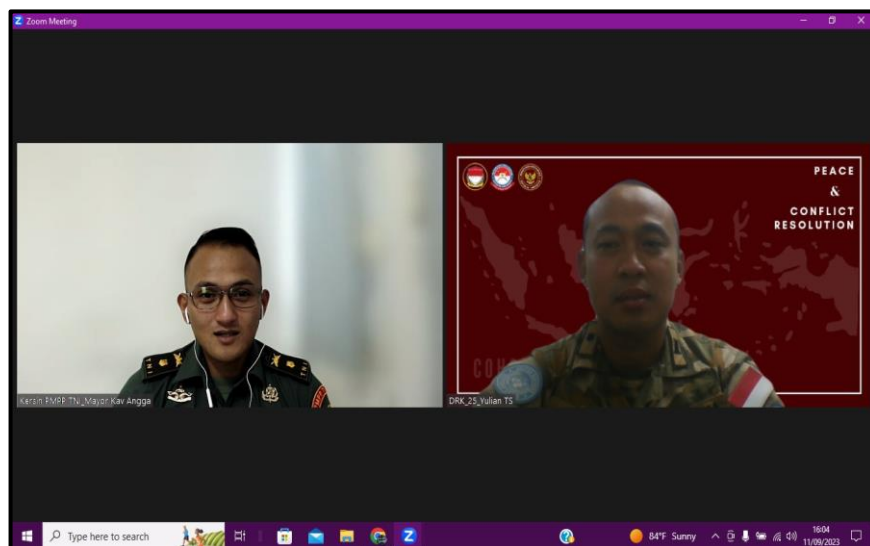
Misi *offensive* UN jarang terjadi, adapun di MINUSMA (Mali) adalah pada suatu hal khusus atau *in case*. Setiap satgas akan dibekali dengan *Core Pre-Deployment Training Materials* (CPTM), *Specialized Training Materials* (STM), dan *Reinforcement Training Package* (RTP). Dalam materi RTP terdapat *Hijack* dan *Negotiation* dimana bisa dilatihkan tentang usaha bertahan sesuai ROE (*Rules of Engagement*). Di dalam ROE tersebut juga telah dijelaskan bagaimana pentahapan penggunaan senjata (*use deadly force*) apabila dalam keadaan mengancam keselamatan jiwa *peacekeeper*. Terkait kemampuan dan keterampilan seorang *peacekeeper* telah dipersyaratkan oleh UN menjadi 2 bagian yaitu *green materials* (kemampuan perorangan seperti menembak dan kelengkapan pribadi) adalah tanggung jawab satuan asal agar mempersiapkan dan melatih diri sendiri secara rutin sebagai kemampuan wajib yang melekat pada diri setiap prajurit, kemudian bagian ke-2 adalah *blue materials* yang merupakan tugas PMPP yaitu untuk menguji seluruh materi pada 7 hari terakhir menjelang selesainya latihan PDT. Kejadian pada Satgas RDB MONUSCO A yang ditugaskan pada tahun 2019 dimana berhasil melaksanakan kegiatan DDR (*Disarmament, Demobilization, Reintegration*) dengan banyaknya senjata para milisi di Kongo dikarenakan mereka percaya kepada Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh terlatihnya TNI akan sifat teritorial yang telah melekat pada diri pasukan Indonesia dan ternyata cara-cara tersebut efektif menurunkan kriminalitas dan separatis di Kongo. Terkait bantuan pengajar dari BNPT maupun Koopsus TNI tentang pengenalan pengetahuan *counter terrorism* maupun radikalisme baik *soft skill* maupun *hard skill* bisa saja dilakukan oleh PMPP TNI, namun hingga saat ini PMPP TNI masih bisa melatih sesuai porsinya. Inti sari dari PDT adalah merubah *mindset* prajurit dari *offensive* menjadi *defensive* (bila mendapat serangan, cukup bertahan tidak perlu dikejar), oleh karena para anggota *peacekeeper* Indonesia juga ada yang berasal dari pasukan khusus seperti kopassus, denjaka, dan denbravo maka PMPP TNI juga melibatkan koordinator materi (pengajar) dari satuan kopassus, denjaka, dan denbravo yang pernah melaksanakan misi PBB.”



Gambar 4.2.7. Wawancara narasumber dari *Training Unit* Staf Lat PMPP TNI a.n Mayor Inf Hani Surya via *zoom meeting*

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

2. Berdasarkan **keterangan narasumber dari Staf Kersin PMPP TNI didapatkan informasi bahwa:** “Sekedar latihan PDT selama 1 bulan belum cukup untuk membekali para *peacekeeper* Indonesia khususnya untuk para Milobs dan Milstaff. Oleh karena itu, diadakan kursus GPOI untuk mereka agar dapat menyelaraskan perkembangan prosedur, hal-hal baru di UN, dan perkembangan situasi di daerah misi. Pada kursus ini tidak mengupas secara detail tentang *counter terrorism*. Materi tentang *counter terrorism* terdapat pada kursus MPKI (*Military Peacekeeping Intelligence*). Hal tersebut dikarenakan ROE tidak dilibatkan dalam penanganan terorisme, melainkan lebih kepada POC (*Protection of Civilian*), perkembangan isu, dan cara kerja di UN. Namun apabila terdapat perubahan ROE tentang penanganan terorisme maka *counter terrorism* bisa dilaksanakan oleh *peacekeeper*. Hingga saat ini yang bisa dilatihkan oleh PMPP TNI adalah terkait prosedur tentang dinamika seperti *hijack* di lapangan (hanya melatihkan reaksi apa boleh atau tidaknya dilakukan oleh seorang *peacekeeper* di daerah misi termasuk kulturnya).”



Gambar 4.2.8. Wawancara narasumber dari Staf Direktorat Kerja Sama Internasional PMPP TNI a.n Mayor Kav Angga Aditya via *zoom meeting*  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

#### 4.2.1.2. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dan Amerika Serikat dengan *promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations*.

Namun berdasarkan **pernyataan dari Direktorat KIPS Kemenlu RI** bahwa:

“Saat ini belum ada urgensi untuk pembentukan *counter terrorism and peacekeeping task force* di PMPP TNI mengingat *counter terrorism* bukan fungsi utama dari MPP PBB. Meski para pasukan MPP PBB dihadapi oleh tantangan yang kompleks, upaya *counter terrorism* membutuhkan keahlian dan kompetensi yang berbeda dengan pasukan MPP PBB sehingga tidak dapat disatukan. Adapun hal yang dapat dilakukan adalah penguatan PDT untuk membantu para pasukan melindungi diri dan masyarakat sipil dari ancaman terorisme.”

Hal yang seirama juga **disampaikan oleh narasumber dari Staf ODC Kedutaan Amerika Serikat** bahwa:

“Seiring dengan peningkatan tugas *multitask* yang dihadapi *peacekeeper*, penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menghadapi tantangan yang beragam. *Soft skills* seperti kemampuan berkomunikasi, negosiasi, pemahaman budaya, dan pemecahan

konflik juga menjadi sangat penting dalam misi pemeliharaan perdamaian yang melibatkan interaksi dengan masyarakat setempat. Kerja sama Amerika Serikat dengan Indonesia dalam pelatihan *counter terrorism* bagi para *peacekeeper* Indonesia memiliki beberapa potensi keuntungan yaitu: kerja sama dalam pelatihan *counter terrorism* dapat memperkuat hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia dimana hal ini dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih kokoh untuk kolaborasi di bidang keamanan dan pertahanan, melalui pelatihan *counter terrorism*, para *peacekeeper* Indonesia diharapkan akan memiliki pengetahuan dan keterampilan tambahan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi ancaman terorisme dan hal ini akan meningkatkan kemampuan mereka untuk beroperasi secara efektif dalam situasi yang melibatkan kelompok teroris, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih positif terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB dan membantu mencapai keberhasilan tujuan misi tersebut.”

Ditambah lagi dengan adanya dukungan dari satuan tetangga seperti Koopsus TNI dan BNPT yang merupakan stakeholder dalam penanganan terorisme di Indonesia, berikut **pernyataan dari Staf Operasi Koopsus TNI**: “Jika diminta untuk mengajar dan berkolaborasi dalam memberikan materi *counter terrorism* serta melatih para *peacekeeper* Indonesia, kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pihak Amerika Serikat maka dapat membuka peluang untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan terorisme. Dengan mengintegrasikan pendekatan dan metode yang telah teruji, pelatihan dapat menjadi lebih holistik dan efektif. Kolaborasi dengan BNPT dan pihak Amerika Serikat juga bisa memberikan banyak manfaat. Melalui kolaborasi ini, dapat dihasilkan program pelatihan yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya meningkatkan keterampilan militer para *peacekeeper* Indonesia tetapi juga memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan standar aturan internasional dan nilai-nilai kemanusiaan,” tegasnya.



Gambar 4.2.9. Wawancara narasumber dari Staf Ops Koopsus TNI a.n Mayor Psk Rommy Grestayuda Sine  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Begitu pula dengan **pernyataan Staf Subdit Bidang Kerja sama Regional, Multilateral dan Internasional BNPT** yang memberi penekanan bahwa “Penting untuk memastikan kerja sama latihan ini dilakukan dalam kerangka hukum dan etika yang sesuai. Kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional yang berlaku di PBB dan hak asasi manusia perlu diutamakan agar tidak bias terhadap tugas misi perdamaian yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Para *peacekeeper* juga harus memahami akar penyebab terorisme terjadi di daerah misi dan mengetahui perbedaan faktor

budaya, sosial, dan politik untuk memastikan relevansi di setiap daerah misi yang satu dan lain. Selain itu, perlunya pertukaran pengalaman bersama antara para pelatih dan peserta yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran dalam latihan tersebut. Diharapkan keberhasilan misi perdamaian PBB serta membawa nama baik bangsa Indonesia.”





Gambar 4.2.10. Wawancara narasumber dari Staf Subdit Bidang Kerjasama Regional, Multilateral dan Internasional BNPT a.n Ibu Arma Jala Vira Shanty

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

#### 4.2.2. Hasil Studi Literatur.

##### 4.2.2.1. Pandangan Kemenlu RI dan ODC Kedubes Amerika Serikat tentang kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat untuk *promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations* dalam rangka menyempurnakan latihan PDT di PMPP TNI.

Berdasarkan **Jurnal oleh Shafa Salsabila dan Hasan Sidik (2023) dengan judul “Kerja Sama Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pelatihan *Peacekeeper* melalui Garuda Canti Dharma II”**, diperoleh keterangan dan informasi sebagai berikut:

Kerja sama antara negara Indonesia dan Amerika Serikat dalam melatih pasukan pemeliharaan perdamaian (*peacekeeper*) melalui pelaksanaan latihan *Global Peace Operation Initiative* (GPOI) *Capstone Multi Peacekeeping Exercise Garuda Canti Dharma*. Kerja sama ini berlangsung pada rentang tanggal 18-31 Juli 2022. Tujuan kerja sama ini adalah memberikan pelatihan mengenai situasi dan masalah yang dihadapi dalam misi perdamaian, sebagai

bagian dari tantangan global dan ancaman terhadap keamanan serta perdamaian internasional.

Kerja sama melalui latihan Garuda Canti Dharma tahun 2022 mencerminkan kolaborasi dalam pelatihan pasukan penjaga perdamaian antara Indonesia melalui Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI) dan Amerika Serikat melalui *United States Indo-Pacific Command* (USINDOPACOM). Hubungan ini sudah terjalin sejak tahun 2006, di mana Amerika Serikat telah membantu meningkatkan kapasitas pemeliharaan perdamaian Indonesia dengan menyediakan dana melalui *Global Peace Operation Initiative* (GPOI). GPOI bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan peralatan operasional di pusat perdamaian dan keamanan Indonesia. Kerja sama antara kedua negara mencakup berbagai latihan seperti Garuda Shield, UN Logistik, UNSOC, dan UN CIMIC yang bertujuan untuk melatih *peacekeeper* Indonesia sebelum diberangkatkan dalam tugas. Dengan demikian, PDT dan kerja sama pelatihan lainnya menjadi sangat penting untuk memastikan kesiapan dan kapabilitas pasukan penjaga perdamaian Indonesia sebelum diterjunkan dalam misi operasional (Shafa Salsabila, 2023).

Berdasarkan **Buku Lensa Satu Tahun Indonesia di Dewan Keamanan PBB yang diterbitkan tahun 2019 oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI** didapatkan informasi sebagai berikut:

*Peacekeeping Operations* (PKO) merupakan “*flagship enterprise*” yang dibentuk PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mendasarkan pada tiga prinsip dasar, yakni persetujuan para pihak yang bertikai (*consent of the parties*), ketidakberpihakan (*impartiality*), dan tanpa penggunaan kekuatan bersenjata kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat (*non-use of force, except in self-defence and in defence of the*

*mandate*).

Setelah Perang Dingin berakhir, MPP PBB mengalami perubahan konteks dari misi yang bersifat "tradisional" dengan fokus pada tugas-tugas militer menjadi misi yang lebih "multidimensional". Perubahan ini sejalan dengan evolusi karakteristik konflik yang dihadapi oleh MPP PBB, yang beralih dari konflik antarnegara dan tantangan asimetris seperti ancaman kelompok bersenjata, konflik komunal, terorisme dan radikalisme, hingga penyakit menular dalam konflik internal negara dan perang saudara. Meskipun demikian, Indonesia tetap berkontribusi pada MPP PBB sejak tahun 1957 dengan menghormati prinsip dasar yang telah ditetapkan.

Sebagai *Troops/Police Contributing Countries* (TPCC) sejak tahun 1957, Indonesia telah meraih penghargaan dari berbagai pihak. Kredibilitas, profesionalisme, dan peran aktif Indonesia menjadi salah satu pertimbangan utama bagi PBB untuk meningkatkan kontribusi Indonesia. Pengakuan tersebut tidak hanya mencakup keberhasilan *peacekeepers* Indonesia dalam melaksanakan *community engagement* untuk memenangkan hati dan pikiran warga setempat di daerah misi, tetapi juga melibatkan keberhasilan dalam program *Disarmament, Demobilization, and Reintegration* (DDR) sebagai elemen pendukung menuju perdamaian berkelanjutan (*sustaining peace*).

Indonesia berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung upaya global dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme, termasuk melalui pengembangan kapasitas dan kerja sama internasional. Dalam memerangi terorisme, Indonesia akan terus mengedepankan strategi komprehensif yang mengkombinasikan pendekatan *hard approach* melalui upaya penegakan hukum dan *soft approach* melalui upaya pencegahan, deradikalisasi, dan *interfaith dialogue*. Indonesia juga terus mendorong kerja sama dengan badan DK PBB untuk memajukan pembahasan isu penanggulangan terorisme,

dengan memanfaatkan peluang kerja sama di bawah kerangka *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* (UNGCTS) melalui kerja sama dengan *United Nations Office of Counter Terrorism* (UNOCT), *Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime* (TPB-UNODC), dan *United Nations Counter Terrorism Executive Directorate* (UNCTED). Di luar kerangka PBB, Indonesia juga aktif dalam *Global Counter Terrorism Forum* (GCTF), sebagai penggagas sekaligus *co-chairs* dari GCTF *Countering Violent Extremism Working Group* (2017-2021) bersama Australia yang membahas isu penanganan dan penanggulangan paham kekerasan dan ekstrimis di masyarakat.

Indonesia juga memberikan perhatian serius terhadap isu penanggulangan pendanaan terorisme, khususnya melalui keaktifannya pada *Asia Pacific Group on Money Laundering* dan *Financial Action Task Force* (FATF). Indonesia saat ini berstatus sebagai *observer* di FATF dan sedang menjalankan proses *Mutual Evaluation Review* sebagai tahapan menjadi anggota penuh FATF pada tahun 2020. Pada tingkat regional, Indonesia telah dipercaya sebagai *lead-sheppard* di ASEAN untuk memimpin isu penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, khususnya dalam rangka pengembangan ASEAN *Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism* (2018-2025) serta implementasinya. Selain itu, dalam rangka penguatan kapasitas para penegak hukum di kawasan, Indonesia terus berperan aktif memberikan berbagai pelatihan melalui *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) bersama dengan Australia sejak tahun 2004. Hingga saat ini, JCLEC telah melaksanakan sebanyak 1.500 program, dengan melibatkan 31.459 peserta dan 5.265 pelatih dari 73 negara, dengan pendanaan oleh lebih dari 20 negara (Kemenlu RI, 2019).

Berdasarkan sumber berita dari internet “Satgas Indobatt selenggarakan *Sec East UNIFIL-LAF Urban Combat Training*” (tniad.mil.id, 2019) didapatkan informasi bahwa: “Latihan *Urban Combat* tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan tempur prajurit, tetapi juga berfungsi sebagai forum di mana peserta dapat berbagi pengalaman, memperkuat hubungan antara satuan di jajaran *Sec East* (Sektor Timur) UNIFIL dengan LAF (*Lebanese Armed Forces*). Tujuan latihan ini tidak hanya sebatas menyamakan persepsi dan bertukar pengalaman, tetapi juga untuk membangun kerja sama yang solid antara satuan di Sektor Timur dengan LAF. Hal ini bertujuan agar berbagai materi yang diberikan dapat dijadikan sebagai bekal berharga dalam mendukung pelaksanaan tugas. Peserta diharapkan mampu mengatasi kendala dan menemukan solusi atas potensi masalah yang mungkin timbul saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Materi pelatihan mencakup teori dasar pertempuran kota, latihan menembak, dan simulasi pertempuran jarak dekat/PJD (TNI AD, 2019).





Gambar 4.2.11. UNIFIL *Urban Combat Training*

Sumber: Satgas Indobatt Selenggarakan Sec East UNIFIL-LAF *Urban Combat Training* (tniad.mil.id, 2019)

#### 4.2.2.2. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dan Amerika Serikat dengan *promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations*.

Berdasarkan **sumber berita Kemlu RI dari internet (kemlu.go.id, 2023)**, diperoleh informasi:

Sejak Amerika Serikat mencabut embargo militernya terhadap Indonesia pada tahun 2006, kerja sama pertahanan antara

kedua negara terus berkembang dalam hal jumlah kegiatan, ruang lingkup kerja sama, serta tingkat keterlibatan.

Indonesia dan Amerika Serikat telah menyelenggarakan pertemuan militer tahunan melalui *Indonesia-United States Security Dialog* (IUSSD) sejak tahun 2002, di mana para pejabat tinggi militer kedua negara meninjau kerja sama bilateral mereka, serta bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global serta masalah keamanan.

Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat telah menandatangani pernyataan bersama yang menetapkan fokus kegiatan untuk memajukan kerja sama kedua negara, sebagai berikut:

1. Kerjasama Maritim.
2. Pengadaan, Penelitian dan Pengembangan Bersama.
3. Meningkatkan Profesionalisme.
4. Kerjasama Operasi dan Pelatihan Penjaga Perdamaian.
5. Bantuan Kemanusiaan dan Tanggap Bencana.
6. Melawan Ancaman Transnasional (Kemenlu RI, 2023).

Berdasarkan **sumber berita Kemhan RI dari internet (kemhan.go.id, 2023)**, diperoleh informasi:

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra membahas sejumlah agenda pembicaraan mengenai berbagai tantangan dunia saat ini yang semakin dinamis dengan Senator Amerika Serikat Tammy. Indonesia memiliki kemitraan keamanan jangka panjang dengan Amerika Serikat yang difokuskan pada penguatan hubungan pertahanan bilateral dalam bidang prioritas seperti keamanan maritim, kontraterorisme, dan profesionalisasi. Dalam pembicaraan mengenai isu-isu keamanan kawasan dan perkembangan situasi di Laut China Selatan, Wamenhan M. Herindra menegaskan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan dialog dan diplomasi.

Dalam bidang pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) membahas kerja sama pengembangan industri pertahanan dengan memberikan prioritas pada skema *Transfer of Technology* (ToT). Hal ini dianggap dapat meningkatkan kemampuan prajurit TNI, sambil diyakini bahwa industri pertahanan Indonesia akan membuka lebih banyak peluang kerja sama pertahanan antara kedua negara. Terkait kerja sama pertahanan di bidang pendidikan, Senator Duckworth memberikan dukungan untuk program *International Military Education and Training* (IMET), dan melihat kerja sama ini sebagai cara untuk memastikan terjalannya kerja sama pertahanan jangka panjang (Kemhan, 2023).

Berdasarkan **Buku Putih Pertahanan Kemhan RI** didapat informasi sebagai berikut:

Kedua negara memiliki komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dengan meningkatkan komunikasi dan konsultasi, serta mengembangkan kerja sama guna kemajuan kedua negara, khususnya dalam bidang pertahanan. Komitmen kerja sama kedua negara dituangkan dalam pengaturan kerangka kegiatan kerja sama dalam bidang pertahanan antara Kemhan RI dan Departemen Pertahanan AS (*Framework Arrangement on Cooperative Activities in the field of Defence between Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and Department of Defence of the United States of America*). Bidang kerja sama yang dikembangkan meliputi: dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama; meningkatkan sumber daya manusia pada institusi pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua negara melalui pendidikan dan pelatihan; proyek pengembangan kapasitas tentang keamanan maritim; serta kerja sama logistik dan persediaan militer. Kerja sama pertahanan kedua negara diimplementasikan dalam bentuk: *Indonesia-United States Security Dialogue* (IUSSD); *United States-Indonesia Bilateral Defence Dialogue* (USIBDD); *Military*

*Assistance Program (MAP); International Military Education and Training (IMET); Foreign Military Sales (FMS); dan Foreign Military Financing Program (FMFP) (TNI, 2017).*

#### **4.3. Hasil Pengolahan Data.**

Data yang telah diperoleh akan diolah melalui tahap reduksi data. Pada tahap ini, data yang disajikan telah melalui proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data agar sesuai dengan fokus penelitian. Setelah didapat data hasil pengolahan maka akan dibandingkan dengan data pengamatan peneliti (hasil observasi).

##### **4.3.1. Pandangan Kemenlu RI dan ODC Kedubes Amerika Serikat tentang kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat untuk *promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations* dalam rangka menyempurnakan latihan PDT di PMPP TNI.**

Berdasarkan sumber data yang ada, maka peneliti membuat beberapa indikator dari pandangan kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat dalam *promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations* untuk menyikapi perkembangan dinamis isu terorisme di daerah misi, meliputi:

##### **a. Pelatihan PDT.**

**Menurut Staf Direktorat KIPS Kemenlu RI** salah satu bentuk kerja sama antara negara Indonesia dan Amerika Serikat dalam domain MPP PBB adalah melalui *Global Peace Operations Initiative* (GPOI). Dengan menggunakan GPOI, Amerika Serikat mendukung negara-negara yang mengirim pasukan untuk MPP PBB dengan menyelenggarakan program pengembangan kapasitas dan penyediaan fasilitas logistik yang diperlukan. Kerja sama yang ditujukan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan keahlian pasukan dalam melindungi diri dan masyarakat sipil dari

ancaman kelompok teroris. Adapun hal yang dapat dilakukan adalah penguatan PDT untuk membantu para pasukan melindungi diri dan masyarakat sipil dari ancaman terorisme.

**Hal tersebut senada dengan Staf ODC Kedutaan Amerika Serikat bahwa** Amerika Serikat telah memberikan bantuan dalam hal pelatihan dan peningkatan kapasitas personel militer Indonesia yang akan ditempatkan dalam misi pemeliharaan perdamaian. Ini termasuk pelatihan dalam bidang logistik, komunikasi, menyediakan peralatan, kendaraan, perlengkapan medis, dan sumber daya lain yang diperlukan. Namun apabila ada perkembangan yang menunjukkan peningkatan ancaman dari kelompok bersenjata yang dianggap sebagai teroris di daerah misi dan bila memerlukan pelatihan tambahan dalam materi *counter terrorism*, maka Amerika Serikat dapat memberikan bantuan dengan catatan kedua pihak negara yaitu Amerika Serikat (ODC) dan pihak militer Indonesia harus berkoordinasi dan berkomunikasi terlebih dahulu dengan baik untuk menentukan jenis pelatihan yang paling relevan dan efektif.

Menurut pendapat dari **para praktisi *peacekeeper* baik Satgas UNIFIL (Danki TF-B), MINUSCA (Wadansatgas), dan MONUSCO (Pasiops RDB)** menyatakan bahwa selama 1 bulan mereka telah menerima materi saat PDT di PMPP TNI sebelum berangkat misi yaitu dengan kriteria yang sama dimana dibagi menjadi 3 bagian meliputi 2 materi (pokok dan pendukung) dan 1 materi teknis yang tergolong berbeda sesuai tugas di daerah misi, seperti Satgas MINUSCA menerima dan melaksanakan materi tentang zeni konstruksi yaitu membuat suatu bangunan atau membuat jalan.

**Hal tersebut diperkuat oleh Stafplat PMPP TNI yang memberikan pernyataan bahwa** setiap Satuan Tugas

(Satgas) akan dibekali Materi Pokok dan Pendukung (*Core Pre-Deployment Training Materials - CPTM*), Materi Pelatihan Khusus (*Specialized Training Materials - STM*), dan Paket Pelatihan Penguatan (*Reinforcement Training Package - RTP*). Dalam materi RTP terdapat *Hijack* dan *Negotiation* dimana bisa dilatihkan tentang usaha bertahan sesuai ROE (*Rules of Engagement*). Di dalam ROE tersebut juga telah dijelaskan bagaimana pentahapan penggunaan senjata (*use deadly force*) apabila dalam keadaan mengancam keselamatan jiwa *peacekeeper*. Inti sari dari latihan PDT adalah merubah *mindset* prajurit dari *offensive* menjadi *defensive* (bila mendapat serangan, cukup bertahan tidak perlu dikejar).

Di sisi lain **Staf Kersin PMPP TNI memberikan pendapat bahwa** latihan PDT selama 1 bulan belum cukup untuk membekali para *peacekeeper* Indonesia khususnya untuk para Milobs dan Milstaff. Oleh karena itu, diadakan kursus GPOI untuk mereka agar dapat menyelaraskan perkembangan prosedur, hal-hal baru di UN, dan perkembangan situasi di daerah misi. ROE tidak dilibatkan dalam penanganan terorisme, melainkan lebih kepada POC (*Protection of Civilian*), perkembangan isu, dan cara kerja di UN. Namun apabila terdapat perubahan ROE tentang penanganan terorisme maka *counter terrorism* bisa dilaksanakan oleh *peacekeeper*.

Sebagai pembandingan didapatkan informasi dari **praktisi *peacekeeper Deputy Commanding Officer Task Force-A SPANBATT 1<sup>st</sup> Lieutenant Nunnes Yagho Fernandez*** bahwa pasukan dari negara Spanyol mendapat latihan PDT selama 6 bulan dimana dibagi menjadi 2 bagian yaitu 4 bulan pertama belajar tentang materi umum dan 2 bulan selanjutnya

tentang materi spesifik (khusus) sesuai jabatan di daerah penugasan. Pada materi umum mereka menerima pelatihan seperti mengemudi dengan medan yang berbeda, sedangkan untuk pasukan infanteri mereka menerima materi lebih dalam tentang taktik meliputi reaksi terhadap *ambush* (penyergapan), *close combat* (pertempuran jarak dekat), *counter IED/explosive device* (penanganan bom), dan menangani sisa UXO (bom yang tidak meledak). Pada materi khusus meliputi pengetahuan taktik, pengamanan saat *convoy* seperti polisi militer, materi POC (*Protection of Civilian*), material barang-barang yang ada di daerah penugasan, dan pengetahuan khusus tentang situasi di daerah misi Lebanon.

Begitu pula informasi lain dari **praktisi *peacekeeper Liaison Officer QRT (Quick Response Team) NEPALBATT Captain Sushant Singbandhari*** bahwa mereka melaksanakan latihan PDT selama 6 bulan dengan menerima beberapa materi meliputi *basic military skill* (latihan dasar militer), *mission specific military training* (latihan khusus misi militer), *personal conduct and discipline* (perilaku kedisiplinan), POC (*Protection of Civilian*), WPS (*Woman, Peace and Security*), *Principles and Guidances UN Operations* (prinsip dan panduan operasi di UN), *Introduction UN peacekeeping system* (pengenalan sistem kerja di UN), *Standardized Tactical Incident Reaction (STIR)* dan *Specific Training*. Pada materi *specific training* diberikan kepada masing-masing personel sesuai tugas/jabatannya contoh untuk *Engineer* (kecabangan Zeni) maka akan menerima pelatihan tentang materi *engineering*, penanganan bom/IED *maupun force protection work* (pekerjaan untuk penguatan/perlindungan seperti pembuatan *bunker*).

Sementara itu, jika dibandingkan **berdasarkan pengamatan dan pengalaman peneliti di lapangan bahwa** waktu penyelenggaraan *Pre-Deployment Training* yang selama ini dilaksanakan hanya dalam 1 bulan dirasakan kurang optimal apabila dihadapkan dengan jumlah materi yang banyak dan harus diberikan kepada pelaku, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena materi yang diterima oleh pelaku terlalu banyak sehingga tidak banyak yang diserap untuk diaplikasikan di lapangan saat di daerah misi. Dalam periode 30 hari yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu Tahap I selama 23 hari dan Tahap II selama 7 hari, dilakukan persiapan dengan fokus pada berbagai aspek. Tahap I mencakup pembekalan dan penyampaian materi inti yang mengacu pada *Core Pre-Deployment Training Materials* (CPTM), selain itu juga mencakup materi pendukung dan teknis. Sementara itu, Tahap II, yang berlangsung selama 7 hari, ditujukan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diberikan selama Tahap I. Metode yang digunakan selama Latihan Pra-Tugas ini melibatkan ceramah, studi kasus, drill teknis, drill taktis, dan latihan lapangan khusus guna penerapan praktis.

Pada materi teknis tentang *Standardized Tactical Incident Reaction* (STIR). STIR merupakan salah satu prosedur yang harus dilaksanakan oleh *peacekeeper* apabila mendapatkan insiden atau menemukan hal-hal yang menonjol terhadap pelaksanaan tugas di lapangan. Berdasarkan pengamatan bahwa STIR kurang begitu aplikatif dan perlu diadakan revisi sesuai dengan kenyataan di lapangan. Alasannya adalah bahwa hampir sebagian besar penanganan kejadian harus ada pelibatan aparat setempat, seperti di UNIFIL maka dalam hal ini *Lebanese Armed Forces* (LAF)

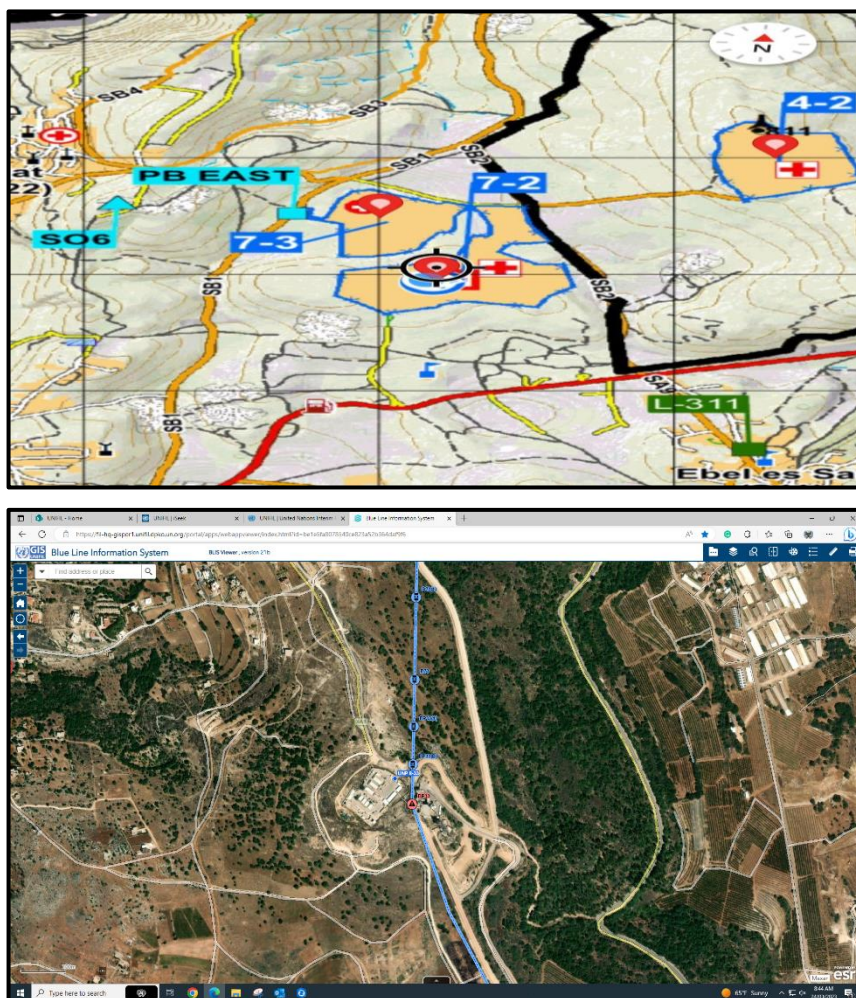
sebagai aparat setempat harus terlibat, baik kejadian yang berskala kecil maupun kejadian berskala besar. Sebagai contoh STIR tentang penanganan pemburu bersenjata. Di dalam STIR dijelaskan bahwa apabila terdapat pemburu yang berada pada jarak 500 meter dari *Blue Line* (masih berdasarkan STIR lama jarak 500 meter padahal pada STIR yang baru pada jarak 200 meter), maka urutan kegiatannya dimulai dari laporan ke Komando Atas oleh Dantim, pengambilan dokumentasi, memerintahkan pemburu agar menjauh dari *Blue Line* dan menunggu pelibatan LAF. Apabila hal tersebut diterapkan maka dapat menimbulkan gap antara masyarakat lokal dengan Pasukan PBB. Seharusnya bisa dilaksanakan komunikasi yang baik secara langsung walaupun ada keterbatasan penggunaan bahasa dengan mengutamakan kearifan lokal di daerah misi, pemberian pengertian dengan kesantunan dari seorang *peacekeeper* kemungkinan dapat mengatasi kejadian tersebut namun dengan catatan faktor keamanan tetap diutamakan. Bila hal tersebut dilaksanakan sesuai situasi di lapangan tanpa harus menunggu LAF datang, maka kemungkinan insiden yang sering terjadi di perbatasan *Blue Line* antara penduduk lokal/LAF dengan tentara israel IDF bisa diantisipasi sebelum tentara IDF datang ke lokasi tersebut.



Gambar 4.3.1. Pasukan Perdamaian PBB dari Indonesia saat menghadang tank Merkava milik Israel untuk meredam ketegangan yang terjadi antara militer Lebanon di perbatasan (Permana, 2021)

Sumber: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/tni-redam-ketegangan-tentara-israel-lebanon-di-perbatasan-/2173316> (2021)

Di sisi lain tentang pengenalan dan pelatihan peta yang diberikan oleh PMPP dengan menggunakan GPS dirasakan kurang tepat sasaran, dikarenakan hal tersebut hampir tidak pernah digunakan di daerah misi Lebanon, yang berlaku adalah dengan menggunakan *avenza maps online* (untuk pergerakan kendaraan) dan *arcgis online* (untuk *plotting* posisi/koordinat peta).




Gambar 4.3.2. Avenza maps *online* dan Arcgis *online*

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Pada bulan April 2023 lalu terjadi insiden terhadap 2 unit mobil Indonesia hancur diserang simpatisan Hezbollah saat patroli, hal tersebut terjadi dikarenakan kesalahan dari anggota patroli yang salah memasuki jalan di area/basis simpatisan Hezbollah akibat kesalahan membaca peta. Karena anggota tersebut tidak menguasai penggunaan *avenza maps online*. Saat kejadian menurut keterangan korban/saksi bahwa pada saat *block road* mereka mendapat perlakuan yang tidak bersahabat dari warga lokal terhadap pasukan Indonesia (korban sudah menyampaikan bahwa

mereka berasal dari Indonesia dan telah mengatakan “*habibi Indonesia*” sesuai ajaran lisan saat PDT dengan harapan mereka mengerti bahwa pasukan Indonesia adalah teman dikarenakan merupakan sesama negara mayoritas muslim dan banyak turut andil dalam bantuan ke Palestina serta tidak pro terhadap Israel), namun warga lokal tersebut tetap menyerang yang mengakibatkan 1 personel luka ringan di bagian kepala akibat pecahan kaca yang dipukul menggunakan kapak dan 2 buah kendaraan patroli Indonesia rusak berat.

**UN CONFIDENTIAL**



**UNITED NATIONS**  
INTERIM FORCE IN LEBANON

**NATIONS UNIES**  
FORCE INTERIMAIRE AU LIBAN

UNIFIL SECTOR EAST HEADQUARTER  
Marjayoun - LEBANON

**INTELLIGENCE SUMMARY 17/APR/2023**

COVERING FROM 00:00 TO 23:59 16 APR 2023

<b>FROM:</b> SECEAST HQ G2	<b>TO:</b> UNIFIL HQ J2
INFO: UNIFIL-SECEAST-MA UNIFIL-SECEAST-DCO UNIFIL-SECEAST-COS UNIFIL-SECEAST-COO UNIFIL-SECEAST-TOC UNIFIL-JOC	UNIFIL-INDOMP00Y UNIFIL-INDOCOY UNIFIL-NBPBATT UNIFIL-SPANBATT UNIFIL-SECWEST UNIFIL-JOC-LNOSE

**FURTHER DISSEMINATION OF THIS DOCUMENT IS FORBIDDEN**  
Copies of this document must be kept in a secure place under the user's responsibility or shredded.  
Information sharing must be abided by the "need to know" policy, avoiding document sharing.


**1. GENERAL OVERVIEW**

**1.1. Highlight**

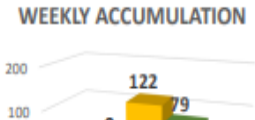
- 1.1.1. BL VIOLATION IN BASTARA, CHEBAA, KAHER CHOUBA AND HOULA
- 1.1.2. UNAUTHORIZED OBSERVATION OF UNIFIL ACTIVITIES IN SARDA
- 1.1.3. UNFRIENDLY BEHAVIOUR ACROSS THE BL IN HOULA
- 1.1.4. AGGRESSIVE BEHAVIOUR ACROSS THE BL IN MEISS EJ JEBEL

**1.2. Chart and Map of events.**

MAJOR INCIDENTS	D-2	D-1	EVOLUTION (%)
Activity in sensitive area	00	01	↑
Unfriendly behaviour across the BL	00	01	↑
Aggressive behavior towards UNIFIL	00	01	↑
<b>Total</b>	<b>00</b>	<b>03</b>	<b>↑</b>
MINOR INCIDENTS	D-1	D-1	EVOLUTION (%)
IDF activity close to BL	11	14	↑
LAF activity close to BL	01	01	↔
BL violation	09	06	↓
Animal crossing the BL	04	02	↓
Unauthorized observation of UNIFIL	01	01	↔
Stone throwing on TF	01	00	↓
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>↓</b>
OTHER ACTIVITIES	D-2	D-1	EVOLUTION (%)
Activity to be investigated	04	04	↔
GWB activity	04	05	↑
Gathering	02	00	↓



**WEEKLY ACCUMULATION**



122  
79

## 5.13 Aggressive behavior towards UNIFIL.

AGGRESSIVE BEHAVIOUR TOWARDS UNIFIL					
No.	SOURCE	IMS	DTG	LOCATION	DESCRIPTION/REMARKS
01	SE ASSETS	7304631	162115APR23 162126APR23	MEISS EJ JEBEL (X1) 735995-3673246	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNIFIL Peacekeepers were subjected to unfriendly behavior IVO B66, northeast of MEISS EL JEBEL (X1).</li> <li>17 individuals in civilian clothes with 09 vehicles (a car, a bike and 07 motorbikes) stopped the UN vehicle and asked the UN patrol their identity.</li> <li>An individual wearing a mask asked about the commander of the patrol and hit a punch on his head.</li> <li>UNIFIL Peacekeepers tried to leave the area, but the civilians hit the vehicle's windows and tires with an axe.</li> <li>At 2126 hrs, the patrol was successfully able to leave the area.</li> <li>At 2201 hrs, the patrol reached OP MAR 8-33A.</li> <li>One UN peacekeeper sustained minor injuries due to broken glass.</li> <li>LAF was informed.</li> </ul>

**G2 COMMENT:** This is the first incident of aggressive behaviour towards UNIFIL this year reported from the municipality of MEISS EL JEBEL. A similar kind of incident had been reported in HOULA on 29APR22 where they hit the vehicle with an iron rod and damaged the UNIFIL vehicle. **EOC**

**G2 ASSESSMENT:** It has been observed that people from some areas in the SECEAST show aversion to UNIFIL patrols out of Sketches when LAF are not escorting them. Due to that, UNIFIL vehicles must be extremely cautious in the routes and in case of any denial of movement, it is highly recommended to abandon the area as soon as possible and take advantage of the protection that offers the vehicles. Furthermore, patrols must carry in the vehicles the delivered cards to explain the population that the patrol has lost with no further intentions. Finally, outreach activities must be aimed at enhancing the Force acceptance in the villages where these incidents have occurred. **EOA**

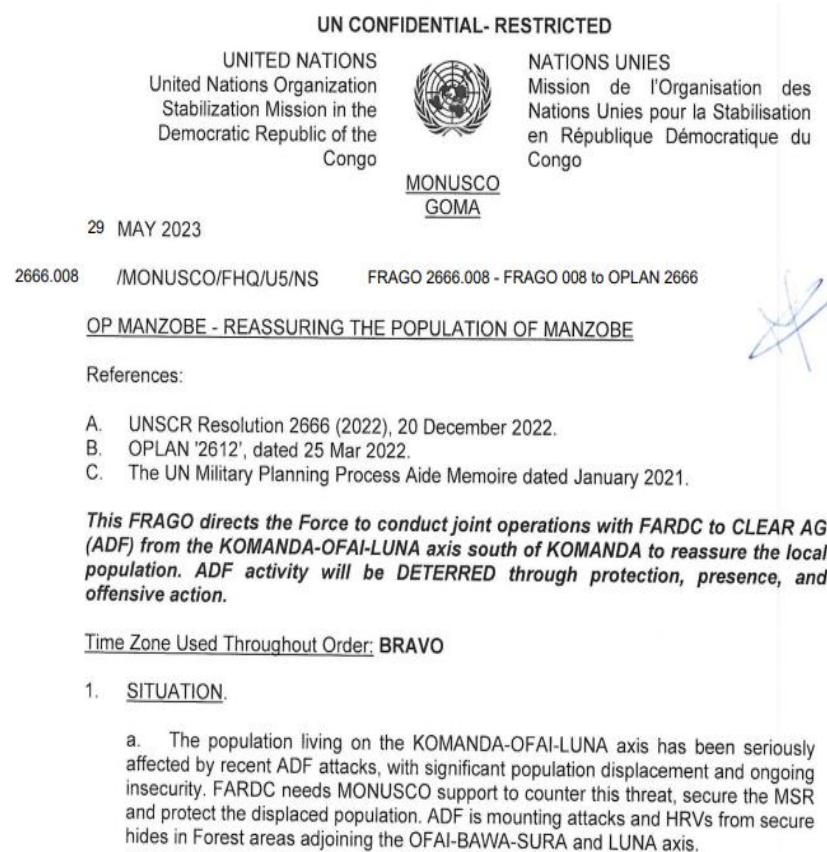


Gambar 4.3.3. Laporan Sec East HQ

Sumber: Staff G-2 Assasment Sec East HQ (2023)

Begitu pula yang terjadi pada Satgas RDB MONUSCO pada bulan Mei 2023 mendapatkan FRAGO (*Fragmentary Order*) untuk melaksanakan Operasi Manzobe di kota Irumu provinsi Ituri, Kongo. Pola operasi yang diterapkan pada Operasi Manzobe ini berbeda dengan materi yang pernah diajarkan di PDT karena pola operasinya adalah *offensive*

(sengaja mencari dan membersihkan/mengeliminir milisi seperti ADF). Hal tersebut juga tidak sesuai dengan UN *Mandate* pada poin "imparsial" dan "tidak menggunakan kekuatan bersenjata kecuali untuk mempertahankan diri dan mempertahankan mandat".



#### Gambar 4.3.4. Frago Operasi Manzobe MONUSCO

Sumber: Pasiops RDB MONUSCO (2023)



Gambar 4.3.5. Pelaksanan Operasi Manzobe MONUSCO

Sumber: Pasiops RDB MONUSCO (2023)

**b. Perkembangan Situasi.**

Berdasarkan **Buku Lensa Satu Tahun Indonesia di Dewan Keamanan PBB yang diterbitkan tahun 2019 oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI** bahwa Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB atau *United Nations Peacekeeping Operations* (UNPKO), telah mengalami perkembangan signifikan dari "misi tradisional" yang terutama terfokus pada tugas-tugas militer menjadi

tugas yang lebih kompleks "multidimensional". Saat ini, UNPKO dirancang untuk memastikan pelaksanaan suatu perjanjian damai dan memberikan bantuan untuk membentuk dasar terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Berdasarkan **pengamatan peneliti** bahwa pendekatan untuk meningkatkan kerja sama pelatihan antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam konteks latihan PDT bisa saja mencakup materi *counter terrorism* meliputi manajemen konflik penanganan terorisme dan ilmu pengetahuan intelijen penggalangan sebagai *knowledge (soft skill)* dan *urban warfare* (pertempuran kota/PJD) sebagai *practice (hard skill)* jika perkembangan situasi *real* di lapangan memerlukan hal tersebut dan jika kedua pihak tersebut setuju. Dengan mempertimbangkan informasi yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, terlihat bahwa perlu dilakukan revisi pada materi STIR agar sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Hal ini terjadi karena kondisi lingkungan daerah misi di seluruh dunia saat ini menjadi semakin kompleks (*the new era of peacekeeping operations*), ditambah lagi dengan semakin merebaknya ancaman terorisme di dunia. Hal yang menjadi pertimbangan utama adalah mengenai resiko keamanan prajurit saat melaksanakan tugas di lapangan. Selain itu, setiap prajurit yang akan diberangkatkan ke daerah misi dirasakan perlu diberikan bekal pengetahuan intelijen tentang ESTOM (Emosi, Sikap, Tingkah laku, Opini, Motivasi) sasaran tugas di daerah operasi, sehingga diharapkan mereka bisa memiliki kepekaan terhadap kemungkinan ancaman yang ada di daerah operasinya sehingga mereka akan lebih waspada dalam menjalankan setiap tugas dimanapun mereka akan di "*deploy*".

**c. Aturan yang berlaku.**

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ada beberapa aturan yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian PBB sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini yaitu Mandat, *Rules of Engagement* (ROE), *Standardized Tactical Incident Reaction* (STIR), dan *United Nations Infantry Battalion Manual* (UNIBAM).

Mandat merupakan dokumen hukum yang dirumuskan melalui proses-proses politik. Proses perancangan mandat melibatkan berbagai pihak, termasuk Negara Anggota Dewan Keamanan PBB, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di negara tertentu, dan pejabat dari bagian politik maupun operasi perdamaian PBB. Mandat merupakan hasil kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dan Dewan Keamanan PBB menetapkan mandat tersebut, memberikan dasar hukum dan otoritas untuk operasi perdamaian tersebut. Penting untuk membedakan mandat dari dasar hukum yang mengatur pelaksanaannya. Dasar hukum operasi perdamaian PBB dapat ditemukan dalam Perjanjian Status Pasukan (*Status of Forces Agreement* - SOFA) yang telah disepakati antara PBB dan negara tuan rumah.

*Rules of Engagement* (ROE) adalah aturan yang memberikan wewenang kepada angkatan bersenjata untuk menggunakan kekerasan, dan menyediakan panduan mengenai syarat-syarat serta batasan-batasan ketika pasukan perdamaian diizinkan untuk memulai atau melanjutkan keterlibatan mereka dalam pertempuran saat menghadapi ancaman. Penggunaan kekerasan oleh pasukan perdamaian harus selaras dengan ROE yang berlaku dalam konteks misi yang sedang dijalankan. ROE ini disesuaikan dengan mandat khusus yang dirumuskan untuk suatu misi

pemeliharaan perdamaian dan mengacu pada kondisi lapangan yang spesifik.

*Standardized Tactical Incident Reaction* (STIR) merupakan salah satu prosedur yang harus dilaksanakan oleh *peacekeeper* apabila mendapatkan insiden atau menemukan hal-hal yang menonjol terhadap pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam menentukan tindakan/reaksi prinsip yang ada di ROE harus selalu diterapkan dalam menghadapi segala situasi yang terjadi di lapangan.

Sebagaimana tercantum dalam *United Nations Infantry Battalion Manual* (UNIBAM) yang dikeluarkan oleh UNDPKO, disebutkan bahwa Batalyon Infanteri PBB terdiri dari 3-4 Kompi dan 1 Kompi Bantuan dengan kekuatan personel 850 orang. Organisasi yang disusun menyesuaikan dengan tuntutan tugas yang dibebankan oleh Satuan tersebut di daerah operasi.

*“The UN Infantry Battalion organization is designed on a modular structure with independent operational capability and logistic sustainment to be versatile and capable of performing multifaceted tasks unique to the peacekeeping environment. Various technical and skilled personnel, and specialised equipment enhancements in core capabilities suggested in the organization are designed for optimal performance in the mission area.”*

Dari keterangan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mengoptimalkan keberhasilan satuan dalam mencapai tugas pokoknya di daerah operasi dibutuhkan berbagai kemampuan teknis dan personel yang terampil. Oleh karenanya, dihadapkan dengan durasi waktu pelaksanaan *Pre-Deployment Training* yang cukup singkat (1 bulan), maka tidaklah memungkinkan apabila melatih personel yang belum

memiliki kemampuan dasar atau keterampilan teknis sama sekali. Apalagi apabila jabatan yang akan diembannya pada saat pelaksanaan tugas ke depan merupakan jabatan yang membutuhkan keahlian khusus. Prinsip "*the right man on the right place*" harus senantiasa dipedomani sejak tahap perekrutan personel hingga penyusunan organisasi Batalyon Mekanis. Terdapat 8 Kemampuan Utama yang harus dimiliki oleh Batalyon Mekanis sebagai syarat agar dapat melaksanakan tugas pokoknya secara optimal yaitu:

**1. Command, Control and Communications (C3).**

Hal ini berarti bahwa Komando dan Pengendalian harus berjalan dengan baik terhadap satuan bawahannya sehingga semua perintah, arahan dan keinginan Komando Atas tetap berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang efektif dan efisien antara atasan dan bawahan serta didukung oleh alat komunikasi yang memadai.

**2. Firepower.** Daya tembak merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh Batalyon yang profesional, di mana dalam hal operasi pemeliharaan perdamaian kemampuan ini bukanlah untuk menghadapi musuh. Kemampuan ini ditujukan untuk melindungi, mencegah, dan meminimalisir berbagai kemungkinan ancaman yang ada di daerah operasi. Kemampuan ini alah satunya adalah kemampuan dalam mengerahkan Senjata Bantuan yang dimiliki oleh Batalyon, termasuk dalam kondisi *mobile* atau bergerak. Operasional Senjata Bantuan itu sendiri tidak dapat dilakukan oleh semua prajurit Infanteri, sehingga prajurit yang memiliki keterampilan atau mengawaki Senjata Bantuan mutlak diperlukan dalam organisasi Batalyon

Infanteri PBB.



Gambar 4.3.6. Latihan *Steel Storm* UNIFIL

Sumber: Danki TF-B Indobatt Sec East UNIFIL (2023)

3. **Mobility.** Mobilitas berarti bahwa satuan harus mampu bergerak dengan cepat di daerah operasi dalam pelaksanaan tugasnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat, memonitor setiap perkembangan situasi di lapangan serta mendukung pelaksanaan tugas sebagai Satuan Reaksi Cepat terutama untuk hal-hal yang bersifat darurat.

4. **Force Protection.** Batalyon Infanteri perlu memiliki kemampuan untuk melindungi satuannya dari berbagai

kemungkinan ancaman yang mungkin muncul di daerah operasi, baik itu ancaman langsung maupun tidak langsung. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kemampuan analisis terhadap potensi risiko yang mungkin dihadapi di daerah operasi, peningkatan tingkat keamanan satuan, penerapan taktik yang tepat, serta langkah-langkah pencegahan dalam bidang kesehatan.

**5. *Tactical Information.*** Informasi taktis, terutama tentang keadaan daerah operasi, harus senantiasa dipelihara dan dianalisa oleh Staf Batalyon sehingga dapat diambil tindakan antisipatif yang cepat dan tepat oleh Komandan Satuan terhadap perkembangan situasi di lapangan.

**6. *Sustainment.*** Kemampuan ini merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan logistik Satuan seperti makanan, air, akomodasi, kebersihan/sanitasi, pemeliharaan, pencegahan kerusakan materil, dukungan kesehatan, dan sebagainya.

**7. *Interoperability.*** Batalyon Infanteri harus memiliki kemampuan operasional untuk berintegrasi dengan satuan lain secara efektif dan efisien sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik tentang komando, pengendalian, dan komunikasi. Untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan koordinasi dan kemampuan berbahasa yang baik serta sistem komunikasi yang relevan untuk pelaksanaan operasi gabungan.

**8. *Civil Interaction.*** Di daerah operasi, Batalyon Infanteri harus mampu berinteraksi dengan masyarakat setempat. Prinsip “*to win the mind and heart of the people*” harus senantiasa diaplikasikan sehingga tugas

pokok dalam memelihara perdamaian di daerah operasi dapat tercapai dengan baik, seperti dengan kegiatan CIMIC (*Civil Military Coordination*) di daerah operasi.



Gambar 4.3.7. Kegiatan CIMIC di desa Komanda, Kongo

Sumber: Pasiops RDB MONUSCO (2023)

#### **4.3.2. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dan Amerika Serikat dengan *promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations*.**

Beberapa indikator dari keuntungan yang diperoleh dari kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat dalam *promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations* untuk menyikapi

perkembangan dinamis isu terorisme di daerah misi, yaitu:

**a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan militer pasukan dalam melindungi diri dan masyarakat sipil.**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber Staf Direktorat KIPS Kemenlu RI bahwa meskipun didapati adanya ancaman serangan dari kelompok bersenjata maupun teroris di daerah misi, terdapat konsensus di PBB bahwa Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB bukan alat yang tepat untuk operasi *counter terrorism* karena tidak termasuk dalam mandat misi yang berfokus pada perlindungan sipil dan restorasi perdamaian. Walaupun begitu, PMPP TNI dan Pusat Misi Internasional (Pusmisinter) Polri telah menyiapkan materi fisik untuk mempersiapkan pasukan untuk membela diri kiranya ada ancaman. Dalam hal ini, kerja sama dapat ditujukan untuk pengembangan kapasitas untuk meningkatkan keahlian pasukan dalam melindungi diri dan masyarakat sipil dari ancaman kelompok teroris.

Pendapat lain disampaikan oleh narasumber dari Staf ODC Kedutaan Amerika Serikat bahwa pelatihan *counter terrorism* akan menjadi pertimbangan penting dalam hal melindungi para *peacekeeper* dan memastikan keberhasilan misi, serta mengevaluasi kemampuan personel militer Indonesia yang akan ditempatkan dalam misi pemeliharaan perdamaian. Namun, harus dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap misi pemeliharaan perdamaian secara keseluruhan dan harus selaras dengan kebijakan internasional dan peraturan PBB yang mengatur misi tersebut.

Berbeda dengan pandangan Wadansatgas MINUSCA

**selalu praktisi *peacekeeper* menyatakan bahwa** dipandang perlunya latihan terkait penanganan ancaman terorisme karena tidak menutup kemungkinan di daerah misi Afrika MINUSCA akan selalu terjadi perubahan situasi.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh **Pasiops RDB MONUSCO yang merupakan praktisi *peacekeeper* juga, menyatakan bahwa** mereka memerlukan pelatihan tersebut disertai dengan adanya penyamaan persepsi dari UN, berikut payung hukum UN yaitu mengenai perubahan mandat dan resolusi UN sehingga tidak ada keraguan bagi setiap prajurit dalam mengambil tindakan di lapangan, dengan tujuan agar tidak tersangkut hukum nantinya.

Apabila hal tersebut direalisasikan dengan harapan kejadian insiden yang menimpa pasukan TF-B Indobatt UNIFIL yang sedang melaksanakan tugas patroli tidak terulang kembali dan menghindari korban jiwa, dimana agar prajurit tidak melakukan kesalahan teknis di lapangan dan tidak bingung atau ragu untuk ambil tindakan saat menghadapi ancaman di lapangan.

**b. Memperat hubungan diplomatik dan persahabatan antara Amerika Serikat dan Indonesia.**

Berdasarkan **informasi narasumber dari Staf ODC Kedutaan Amerika Serikat bahwa** kerja sama Amerika Serikat dan Indonesia dalam pelatihan *counter terrorism* bagi pasukan penjaga perdamaian Indonesia memiliki beberapa potensi manfaat, yaitu antara lain: kerja sama dalam pelatihan *counter terrorism* dapat memperkuat hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia dimana hal ini dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih kokoh untuk kolaborasi di bidang keamanan dan pertahanan, kemudian

melalui pelatihan *counter terrorism* maka para *peacekeeper* Indonesia diharapkan akan memiliki pengetahuan dan keterampilan tambahan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi ancaman terorisme sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk beroperasi secara efektif apabila dalam situasi yang melibatkan kelompok teroris.

Informasi tersebut di atas diperkuat oleh **pernyataan dari Staf Operasi Koopsus TNI bahwa** kerja sama dengan pihak Amerika Serikat dapat membuka peluang untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan terorisme, dapat dihasilkan program pelatihan yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya meningkatkan keterampilan militer para *peacekeeper* Indonesia tetapi juga memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan standar aturan internasional dan nilai-nilai kemanusiaan.

**Pendapat dari Staf Subdit Bidang Kerja sama Regional, Multilateral dan Internasional BNPT menyatakan bahwa** apabila latihan tersebut diadakan maka pertukaran pengalaman bersama, baik antara sesama pelatih maupun peserta yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran selama latihan tersebut, sehingga diharapkan keberhasilan misi perdamaian PBB tercapai serta dapat membawa nama baik bangsa Indonesia.

Menurut **Buku Putih Pertahanan Kemhan RI bahwa** keuntungan program-program bantuan yang telah diperoleh oleh Indonesia dari Amerika Serikat antara lain dapat meningkatkan kemampuan militer negara Indonesia baik intelijen, teknologi, dan pelatihan termasuk penanganan terorisme melalui program pendanaan militer asing FMF (*Foreign Military Finance*), pengadaan alutsista militer FMS

(*Foreign Military Sales*), IMET (*International Military Education and Training*), dan lain-lain.

Di sisi lain **menurut pengamatan peneliti** manfaat kerja sama tersebut bagi Amerika Serikat melalui kemitraan dengan Indonesia, sebuah negara yang memiliki peran penting dalam wilayah Asia Tenggara (ASEAN) adalah bahwa Amerika Serikat dapat memastikan stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Hal ini memberikan keuntungan karena mendukung kepentingan strategis Amerika Serikat di Asia Tenggara. Kerja sama ini tidak hanya dapat mencegah penyebaran pengaruh kelompok teroris di wilayah tersebut, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan secara global, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

#### 4.4. Hasil Analisis Data.

Data yang telah diolah akan dianalisis dengan merujuk pada beberapa teori atau pandangan dari para ahli. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan temuan penelitian yang dapat diinterpretasikan guna mencapai suatu kesimpulan sementara.

Tabel 4.4. Hasil Analisis Data

No	Fokus	Indikator	Hasil Wawancara dan Pengamatan	Teori atau Pendapat Pakar
1.	Pandangan Kemenlu RI dan ODC Kedubes Amerika Serikat tentang kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat untuk	Pelatihan PDT	- Materi yang diberikan cenderung kurang aplikatif termasuk tidak ada materi <i>counter terrorism</i> - Waktu pelaksanaan	- Bertentangan dengan teori perdamaian menurut John Galtung yang menyebutkan bahwa terdapat tiga tahapan

<p><i>promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations</i></p> <p>dalam rangka menyempurnakan latihan PDT di PMPP TNI</p>		<p>latihan yang relatif singkat (terburu-buru) sehingga tidak terpatri secara maksimal kepada prajurit/peserta latihan</p> <p>- Proses pelatihan sama dari waktu ke waktu, tidak mengikuti <i>update</i> situasi di lapangan dari daerah misi satu dengan yang lain</p>	<p>pendekatan/ penanganan dalam mencapai perdamaian yaitu <i>peacemaking, peacekeeping, peacebuilding</i> (Galtung, 1976). Dimana setiap tahapan tersebut digunakan sesuai pada tingkatan situasi dan kondisi negara yang sedang</p>
	Perkembangan situasi	Terjadi dinamika transisi tugas misi tradisional ke multidimensional	<p>berkonflik.</p> <p>- Tidak sejalan dengan teori terorisme yang didalamnya memuat Hukum Internasional telah memberikan pengaturan terhadap tindakan terorisme</p>
	Aturan yang berlaku	<p>- Terjadi ketidaksinkronan antara mandat dengan pelaksanaan tugas di lapangan</p> <p>- STIR yang tidak <i>update</i></p>	

				dengan diaturnya hal tersebut dalam beberapa konvensi dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada tahun 2016 Dewan Keamanan PBB mengesahkan <i>United Nations Security Council Resolution 2295</i> sebagai penguatan Mandat untuk misi multidimensional.
2.	Keuntungan yang diperoleh Indonesia dan Amerika Serikat	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan militer pasukan	Terjadi ambigu/keraguan prajurit untuk bertindak di lapangan	Tidak sejalan dengan teori kesiapan menurut Yusnawati (2007), kesiapan merupakan suatu kondisi dimana seseorang telah

			<p>mencapai pada tahapan tertentu atau dikonotasikan dengan kematangan fisik, mental, psikologis, dan <i>skill</i>.</p> <p>Menurut Slameto (2010), kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi.</p> <p>Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon.</p>	
		Memperat	Hubungan	Sudah sesuai

		hubungan diplomatik dan persahabatan antara Amerika Serikat dan Indonesia	diplomatik dan persahabatan yang semakin baik dalam kerja sama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat	dengan teori K.J Holsti (1998) dimana melibatkan partisipasi dua negara yang berbeda atau institusi dari dua negara tersebut untuk mengatur kepentingan dari kedua belah pihak
--	--	---	---	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

#### 4.5. Interpretasi Data.

Interpretasi data merupakan kegiatan yang melibatkan penggabungan hasil analisis dengan berbagai kriteria atau standar tertentu. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk merumuskan makna dari data yang terkumpul, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan (Unhan, 2021). Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

##### 4.5.1. Temuan di PMPP TNI

Tabel 4.5.1. Hasil Interpretasi Temuan di PMPP TNI

No	Fokus	Indikator	Temuan	Hasil Sementara
1.	Pandangan Kemenlu RI	Pelatihan PDT	- Materi yang diajarkan/dilatihkan	- Latihan PDT yang

	<p>dan ODC Kedubes Amerika Serikat tentang kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat untuk <i>promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations</i> dalam rangka menyempurna kan latihan PDT di PMPP TNI</p>		<p>monoton (itu-itu saja) tidak mengikuti <i>update</i> situasi di daerah misi. - Waktu latihan PDT singkat hanya 1 bulan dari waktu ideal/normalnya minimal 3-4 bulan (sesuai UN <i>training system</i>). - Proses latihan melalui 2 tahap: Tahap I selama 23 hari (materi pokok, pendukung, teknis) dan Tahap II selama 7 hari (aplikasi lapangan) dan belum melibatkan pelatih dari luar instansi PMPP TNI.</p>	<p>diselenggara kan PMPP TNI begitu padat materinya dan terlalu singkat alokasi waktunya sehingga tujuan latihan untuk mencapai kategori mampu atau menguasai masih diragukan (kesalahan dalam rute patroli UNIFIL). - Masih belum ada keterbukaan untuk mendatang- kan pelatih/ narasumber dari pihak/ instansi lain</p>
--	--	--	--	---

				dengan argumen bahwa staf PMPP masih mampu memberikan materi sesuai dengan porsinya.
		Perkembangan situasi	Masih mengesampingkan <i>update</i> perkembangan situasi di daerah misi, dengan argumen berpegang teguh pada mandat misi.	Belum ada keterbukaan dan inisiatif untuk menambah materi latihan yang sifatnya <i>update</i> situasi di daerah misi, seperti taktik bertempur ( <i>urban warfare</i> ) dalam <i>counter terrorism</i> dan pengetahuan intelijen

				daerah misi.
		Aturan yang berlaku	Tidak melakukan revisi terhadap STIR ( <i>Standardized Tactical Incident Reaction</i> ).	Kurangnya informasi mengenai <i>update</i> situasi di lapangan, sehingga pada saat latihan aplikasi bersifat kaku/ tidak fleksibel.
2.	Keuntungan yang diperoleh Indonesia dan Amerika Serikat	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan militer pasukan	Sebagian besar para prajurit <i>peacekeeper</i> ambigu/ terjadi keraguan untuk bertindak di lapangan.	Hasil <i>out put</i> latihan kurang maksimal dihadapkan banyaknya materi dan waktu singkat terhadap daya tangkap rata-rata prajurit.
		Memperat hubungan	Hubungan kerja sama militer antara	Hubungan bilateral

		diplomati dan persahabatan antara Amerika Serikat dan Indonesia	Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan dengan adanya latihan/ kursus GPOI secara rutin di PMPP TNI.	Indonesia dan Amerika Serikat semakin baik, bahkan saat ini juga adanya kursus tambahan seperti POC dan WPS dari negara Australia maupun Inggris.
--	--	---	---	---

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

#### 4.5.2. Temuan di daerah misi Lebanon (UNIFIL) misi tradisional

Tabel 4.5.2. Hasil Interpretasi Temuan di daerah misi Lebanon (UNIFIL)

No	Fokus	Indikator	Temuan	Hasil Sementara
1.	Pandangan Kemenlu RI dan ODC Kedubes Amerika Serikat tentang kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat untuk <i>promoting</i>	Pelatihan PDT	- Materi yang diajarkan meliputi (materi pokok, pendukung, teknis, dan aplikasi patroli)	Dalam pelatihan PDT diperlukan pendalaman materi seperti pengetahuan peta sesuai yang digunakan di

<p><i>Counter Terrorism in Peacekeeping Operations</i> dalam rangka menyempurnakan latihan PDT di PMPP TNI</p>		- Waktu latihan PDT 1 bulan	daerah misi dan penambahan materi seperti <i>urban warfare</i> (materi pendukung saat aplikasi patroli) yang disesuaikan dengan perkembangan situasi di daerah misi, termasuk <i>update</i> aturan seperti STIR. Setiap satgas
	Perkembangan situasi	Terjadi dinamika situasi di daerah misi (konflik antara kelompok Hezbollah, Fatah, LAF, dan Israel) termasuk tidak adanya rencana kontigensi (repatriasi)	harus dibekali dengan rencana kontigensi dihadapkan dengan situasi yang terjadi saat ini konflik pertempuran antara Israel dan Hamas di Gaza yang telah melebar
	Aturan yang berlaku	Tidak terjadi <i>update</i> terhadap STIR	

				sampai dengan ke Lebanon (antara Hezbollah dan Israel).
2.	Keuntungan yang diperoleh Indonesia dan Amerika Serikat	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan militer pasukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota masih belum menguasai medan dan penggunaan map <i>online</i> dengan sering terjadi insiden salah rute</li> <li>- Kemampuan bahasa Inggris yang lemah apalagi bahasa Arab sehingga menghambat komunikasi dan proses pelaksanaan tugas di lapangan</li> <li>- Kurangnya <i>soft skill</i></li> </ul>	Diharapkan apabila pasukan Garuda menguasai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang telah dilatihkan maka tidak terjadi keraguan untuk bertindak di lapangan sehingga insiden, pelanggaran aturan, dan keselamatan diri pasukan akan lebih terjamin.

			dalam pola pendekatan ke masyarakat lokal (belum tajam dalam materi CIMIC)	Begitu pula dengan tugas POC akan dapat terlaksana lebih baik, dimana akan bermuara
		Memperat hubungan diplomatik dan persahabatan antara Amerika Serikat dan Indonesia	Telah dilaksanakan dalam latihan PDT dengan mengundang narasumber dari negara sahabat saat materi ICRC (Amerika) dan POC (Australia)	pada keberhasilan tugas misi pemeliharaan perdamaian dan akhirnya tertuju pada nama baik bangsa Indonesia di mata warga lokal, komunitas UN di daerah misi, dan dunia internasional.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

#### 4.5.3. Temuan di daerah misi Afrika (MONUSCO dan MINUSCA) misi multidimensional

Tabel 4.5.3. Hasil Interpretasi Temuan di daerah misi Afrika (MONUSCO dan MINUSCA)

No	Fokus	Indikator	Temuan	Hasil Sementara
1.	Pandangan Kemenlu RI dan ODC Kedubes Amerika Serikat tentang kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat untuk <i>promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations</i> dalam rangka menyempurnakan latihan PDT di PMPP TNI	Pelatihan PDT.	- Materi yang diajarkan meliputi (materi pokok, pendukung, teknis, dan aplikasi OLI untuk MONUSCO, sedangkan Satgas MINUSCA aplikasi konstruksi bangunan dan alat berat). - Waktu latihan PDT 1 bulan.	Dalam pelatihan PDT diperlukan materi tambahan yang sesuai dengan perkembangan situasi di daerah misi, seperti <i>close combat tactical</i> //PJD (pertempuran jarak dekat), urban warfare (untuk mendukung materi OLI yang telah
		Perkembangan situasi.	Terjadi dinamika situasi di lapangan	diberikan saat aplikasi), dan <i>soft skill</i> dalam

		<p>bahwa Satgas MONUSCO melaksanakan Operasi Manzobe untuk melaksanakan pembersihan milisi ADF di Kongo.</p>	<p>merangkul para milisi (<i>armed group</i>) agar tidak terjadi pertumpahan darah (pertempuran terbuka) bila mendapat</p>
	<p>Aturan yang berlaku.</p>	<p>Bertentangan dengan Mandat PBB yang telah diajarkan di PMPP TNI.</p>	<p>tugas dari HQ untuk misi pembersihan milisi di daerah konflik dan perlunya dibekali aturan pendukung yang bisa digunakan sebagai payung hukum agar dalam pelaksanaan tugas tidak menyimpang dari Mandat yang telah diberikan apabila terjadi insiden.</p>

2.	Keuntungan yang diperoleh Indonesia dan Amerika Serikat.	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan militer pasukan.	Para <i>peacekeeper</i> ambigu/ terjadi keraguan untuk bertindak di lapangan.	Diharapkan apabila pasukan Garuda menguasai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang telah dilatihkan maka tidak terjadi keraguan bertindak di lapangan sehingga insiden, pelanggaran, dan keselamatan diri pasukan akan lebih terjamin serta tugas POC akan terlaksana lebih baik.
		Mempererat hubungan diplomatik dan persahabatan antara Amerika Serikat dan Indonesia.	Telah dilaksanakan dalam latihan PDT dengan mengundang narasumber dari negara sahabat saat materi ICRC (Amerika) dan POC (Australia).	

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

#### 4.6. Pembahasan.

**4.6.1. Pandangan Kemenlu RI dan ODC Kedubes Amerika Serikat tentang kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat untuk *promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations* dalam rangka menyempurnakan latihan PDT di PMPP TNI.**

##### a. Pelatihan PDT.

Penelitian ini telah menjelaskan tentang data pelatihan PDT dari sudut pandang Kemenlu RI, ODC Kedubes Amerika Serikat, PMPP TNI, dan para praktisi *peacekeeper*. Peneliti akan membahas beberapa temuan tentang pelatihan PDT yang telah dilaksanakan oleh PMPP TNI saat ini. Dalam penelitian ini menemukan bahwa **pelatihan PDT yang diselenggarakan oleh PMPP TNI harus direvisi** sebagai penyesuaian, yaitu:

**Pertama** adalah tentang materi yang diajarkan/dilatihkan monoton (itu-itu saja) tidak mengikuti *update* situasi di daerah misi. Berdasarkan data lapangan, materi yang diberikan cenderung kurang aplikatif termasuk tidak adanya materi *counter terrorism*. Materi yang diajarkan pada Satgas UNIFIL Lebanon yang misinya bersifat tradisional meliputi: materi pokok, pendukung, teknis, dan aplikasi patroli. Materi seperti pendalaman pengetahuan peta sesuai yang digunakan di daerah misi (penggunaan aplikasi *avenza map online/arcgis online*) dan penambahan materi seperti *urban warfare* tidak diberikan, padahal materi tersebut sangat mendukung saat pelaksanaan tugas di daerah misi. Kontingen Indonesia dalam hal ini Indobatt juga sering dilibatkan sebagai pelatih utama dalam latihan *urban warfare* yang diselenggarakan oleh *Sec East UNIFIL HQ*.

Di sisi lain materi yang diajarkan pada Satgas MONUSCO dan MINUSCA di Afrika yang misinya bersifat multidimensional meliputi: materi pokok, pendukung, teknis, dan aplikasi OLI (Operasi Lawan Insurgensi) untuk MONUSCO, sedangkan Satgas MINUSCA aplikasi konstruksi bangunan dan alat berat. Sementara itu, sangat

diperlukan materi tambahan yang sesuai dengan perkembangan situasi di daerah misi, seperti *close combat tactical*/PJD (pertempuran jarak dekat) dan *urban warfare* untuk mendukung materi OLI yang telah diberikan serta materi *soft skill* manajemen konflik, pengetahuan intelijen daerah misi, dan penggalangan yang dapat digunakan dalam merangkul para milisi (*armed group*) agar tidak terjadi pertumpahan darah (pertempuran terbuka) bila mendapat tugas dari HQ untuk misi pembersihan milisi di daerah konflik seperti pelaksanaan Operasi Manzobe oleh Satgas RDB MONUSCO di desa Komanda, Kongo.

Pernyataan tersebut tampaknya tidak sejalan dengan Teori Perdamaian menurut John Galtung yang menyebutkan bahwa terdapat tiga tahapan pendekatan/penanganan dalam mencapai perdamaian yaitu *peacemaking*, *peacekeeping*, *peacebuilding* (Galtung, 1976). Dimana setiap tahapan tersebut digunakan sesuai pada tingkatan situasi dan kondisi negara yang sedang berkonflik. Dalam kerangka teori Galtung, *peacemaking* mengacu pada usaha-usaha yang berfokus pada mediasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik yang lebih luas. Dalam konteks *counter terrorism*, pendekatan *peacemaking* dapat berfokus pada mengatasi akar penyebab terorisme, seperti faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi pada radikalisme. *Peacekeeping* melibatkan penggunaan pasukan internasional atau multinasional untuk menjaga gencatan senjata, mengawasi perbatasan, dan menjalankan operasi kemanusiaan. Dalam hal ini *peacekeeping* dapat berfokus pada memelihara keamanan di wilayah yang rentan terhadap ancaman terorisme, mencegah konflik berskala besar, dan memfasilitasi upaya pemberantasan jaringan teroris. Sedangkan pada tahap *peacebuilding* adalah suatu proses yang bertujuan untuk membentuk perdamaian dengan cara yang praktis, fokus pada implementasi perubahan sosial secara damai. Ini melibatkan upaya

rekonstruksi dan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Proses ini bertujuan untuk mengatasi akar penyebab konflik, mempromosikan rekonsiliasi, dan membangun fondasi yang kokoh untuk perdamaian berkelanjutan. *Peacebuilding* melibatkan upaya untuk membangun institusi yang inklusif, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mengatasi akar penyebab konflik secara berkelanjutan. Dalam konteks *counter terrorism*, *peacebuilding* dapat berfokus pada membangun resiliensi masyarakat terhadap ideologi terorisme, memfasilitasi rekonsiliasi, memperkuat tata pemerintahan yang adil, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja.

Hal tersebut di atas juga tidak selaras dengan hasil penelitian Charles T. Hunt dan Shannon Zimmerman tentang *Counter-Terrorism and Peace Operations: The Impacts of UN Security Council Approaches to Tackling Terror on the Pursuit of Peace* dan *Securing the Future Initiative* oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2022, dimana operasi pemeliharaan perdamaian terbagi dalam lingkup tradisional dan multidimensional, dimana misi multidimensional memerlukan penanganan berbeda, yang memerlukan penguatan mandat dan strategi penanganan *counter terrorism* dapat diimplementasikan seperti misi MINUSMA. Pada tahun 2016, Dewan Keamanan PBB mengotorisasi pasukan pemelihara perdamaian Misi Integrasi Stabilisasi Multidimensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mali (MINUSMA) untuk melakukan "operasi langsung" untuk mengantisipasi, menggagalkan, dan menanggapi ancaman, termasuk ancaman asimetris, dan mengambil langkah-langkah tegas dan aktif untuk melindungi warga sipil, termasuk melalui patroli aktif dan efektif di daerah-daerah di mana warga sipil berisiko, dan mencegah kembalinya kelompok bersenjata ke daerah-daerah tersebut (Zimmerman, 2022). Tentunya hal ini berdampak pada misi di Afrika Tengah (MINUSCA)

dan Kongo (MONUSCO) yang bersifat multidimensional juga. Perlu diakui memang hal tersebut membuat tujuan dan identitas operasi perdamaian PBB dapat menjadi kabur menyimpang dari mandat misi. Sebagai konsekuensinya Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan kembali pendekatan operasional dan mengintegrasikan strategi *Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE)* yang lebih luas, sambil mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip perdamaian yang mendasar. Dengan demikian, upaya PBB dapat lebih efektif dalam mengatasi terorisme dan ekstremisme kekerasan sambil tetap menjaga integritas dan tujuan operasi perdamaian global.

Dalam menjalankan operasi pemeliharaan perdamaian, baik yang bersifat tradisional maupun multidimensional, perlu terus memantau perkembangan situasi di daerah misi. Meskipun misi tradisional lebih berfokus pada penyelesaian konflik antarnegara, seperti yang terlihat dalam misi UNIFIL yang berkaitan dengan konflik perbatasan antara Lebanon dan Israel. Sementara itu, operasi pemeliharaan perdamaian yang bersifat multidimensional lebih menitikberatkan pada penanganan konflik dalam negara (*intra-state*) dan perang sipil, contohnya seperti misi MONUSCO dan MINUSCA. Meskipun begitu, kemungkinan bahwa misi tradisional juga akan menghadapi ancaman serupa terkait dengan isu terorisme dan ekstremisme di wilayah tugas mereka tetap terbuka.

Berdasarkan prediksi di atas, maka seharusnya setiap satgas menerima materi tentang *counter terrorism* baik *knowledge* maupun *practice*. *Knowledge* yang bersifat *soft skill* seperti manajemen konflik penanganan terorisme, pengetahuan intelijen daerah misi, dan penggalangan yang dapat digunakan dalam merangkul para milisi (*armed group*) agar mau menyerahkan diri tanpa peperangan, serta *practice* yang bersifat *hard skill* seperti *close combat tactical*/PJD (pertempuran jarak dekat) dan *urban warfare* dalam

mendukung materi OLI maupun patroli yang telah diberikan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan militer prajurit untuk melindungi diri maupun masyarakat sipil dalam tugas POC (*Protection of Civilian*).

**Kedua** adalah tentang waktu latihan PDT singkat hanya 1 bulan dari waktu ideal/normalnya minimal 3-4 bulan (sesuai UN *training system*). Hal tersebut terkoneksi dengan proses latihan PDT oleh PMPP TNI yang melalui 2 tahap, yaitu: Tahap I selama 23 hari (materi pokok, pendukung, teknis) dan Tahap II selama 7 hari (aplikasi lapangan), serta belum melibatkannya pelatih/instruktur dari luar instansi PMPP TNI. Hal tersebut tidak sejalan dengan fakta banyaknya materi yang harus diterima dan kemampuan daya tangkap manusia rata-rata, sehingga tujuan latihan untuk mencapai kategori mampu atau menguasai masih diragukan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terjadinya beberapa insiden yang terjadi pada patroli di Satgas UNIFIL baik kesalahan rute patroli dibarengi dengan perlakuan kasar dari masyarakat lokal yang mengakibatkan korban luka dan dirusaknya kendaraan patroli serta terbaliknya paser APC Anoa milik satgas Indobatt (akibat tidak bisa menilai medan, tanah labil perkebunan dan sempit tetapi nekat dilewati).





Gambar 4.6.1.1. Kecelakaan Panser/ APC Satgas Indobatt

Sumber: Danki TF-B Indobatt *Sec East* UNIFIL (2023)

Terkait belum melibatkannya pelatih/instruktur dari luar instansi PMPP TNI, hal ini menunjukkan bahwa masih belum ada keterbukaan dari pihak PMPP TNI untuk mendatangkan pelatih atau instruktur dari instansi lain dengan argumen bahwa staf PMPP masih mampu memberikan materi sesuai dengan porsinya. Padahal bila pihak PMPP TNI mau mengundang seperti instansi BNPT maupun Koopsus TNI, mereka dengan senang hati membantu memberikan materi kepada *peacekeeper* sesuai dengan kerangka hukum dan etika terhadap norma-norma hukum internasional yang berlaku di PBB serta standar aturan internasional dan nilai-nilai kemanusiaan

atau hak asasi manusia. Hal ini perlu diutamakan agar para *peacekeeper* tidak bias terhadap tugas misi perdamaian yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Diharapkan para *peacekeeper* mendapat tambahan pengetahuan, kemampuan maupun keterampilan yang dapat membantu pelaksanaan tugas di daerah misi yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan misi dan nama baik bangsa Indonesia.

Hal tersebut di atas tidak selaras dengan Teori Kesiapan oleh Yusnawati dimana kesiapan merupakan suatu kondisi dimana seseorang telah mencapai pada tahapan tertentu atau dikonotasikan dengan kematangan fisik, mental, psikologis, dan *skill* (Yusnawati, 2007). Begitu juga kesiapan menurut Slameto adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi (Slameto, 2010). Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon.

Berdasarkan fenomena di atas, maka seharusnya waktu latihan PDT yang diselenggarakan oleh PMPP TNI lebih dari satu bulan (minimal 3 bulan). Hal tersebut harus dipertimbangkan karena bila melihat perbandingan dengan negara lain seperti Spanyol dan Nepal, mereka melaksanakan latihan PDT selama 6 bulan. Bila hal demikian dilaksanakan diharapkan *out put* hasil latihan akan tercapai mampu dan menguasai pengetahuan, kemampuan, keterampilan para *peacekeeper* Indonesia.

#### **b. Perkembangan situasi.**

Pada penelitian ini telah disinggung dan dibahas mengenai perkembangan situasi yang terjadi di daerah misi baik di Satgas UNIFIL Lebanon maupun di Afrika yaitu Satgas MINUSCA dan MONUSCO. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan banyak terjadi dinamika transisi tugas misi tradisional ke multidimensional,

seperti pada misi UNIFIL Lebanon sering terjadi konflik antara kelompok Hezbollah dan Fatah serta perangkat militer negara Lebanon yaitu LAF. Berdasarkan fakta di lapangan pada tanggal 30 Juli 2023 di wilayah Saida dekat kamp pengungsian Palestina, terjadi insiden serangan bersenjata dan RPG oleh simpatisan Hezbollah kepada kelompok Fatah dan tentara LAF yang pada saat itu akan mengamankan situasi, dimana kejadian tersebut mengakibatkan 6 orang warga sipil meninggal (Al Jazeera, 2023). Tidak hanya itu, serangan dari Hezbollah sering kali juga diarahkan kepada pasukan perdamaian PBB, berikut daftar korban jiwa akibat serangan oleh Hezbollah kepada *peacekeeper* UNIFIL: a) 1 orang prajurit *Spanish Peacekeeper* meninggal dan 2 prajurit lainnya terluka akibat serangan bom mobil saat patroli di perbatasan Israel-Lebanon pada tahun 2008 (Wikipedia, 2023); b) 6 orang prajurit *Italian Peacekeeper* terluka akibat serangan bom saat konvoi kendaraan UN pada tahun 2011 (Wikipedia, 2023); c) 1 orang prajurit *Ireland Peacekeeper* meninggal akibat diserang tembakan saat patroli pada Desember 2022 (AP News, 2023); d) 1 orang prajurit Indonesia terluka beserta 2 unit mobil patroli hancur diserang simpatisan Hezbollah saat patroli pada bulan April 2023 (Sec East UNIFIL, 2023). Hal tersebut mengindikasikan bahwa saat ini tantangan tugas *peacekeeping operations* telah berkembang menjadi *multitask*, dengan indikator di atas misi tradisional UNIFIL telah mengarah kepada multidimensional. Hal tersebut diperkuat dengan dokumen resmi dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Bidang Organisasi Teroris Asing dan Biro Kontra Terorisme bahwa Hezbollah dikategorikan dan terdaftar sebagai organisasi teroris (United States Department of State, 2023).

Didapat informasi tentang tidak adanya rencana kontigensi (repatriasi) dari Satgas Indobatt UNIFIL saat ini, bila suatu saat situasi di daerah misi UNIFIL Lebanon bisa saja dalam status “hitam”.

Seperti kita ketahui bersama, saat ini konflik pertempuran antara Israel dan Hamas di Gaza yang telah melebar sampai dengan ke Lebanon (antara Hezbollah dan Israel) dimana *Head of Mission* UNIFIL telah menentukan bahwa situasi saat ini dalam status “merah”. Walaupun dalam status “kuning” seharusnya setiap satgas memiliki rencana kontigensi, namun fakta yang terjadi adalah berbeda, PMPP TNI belum memiliki referensi dan Satgas Indobatt UNIFIL juga tidak memiliki hal tersebut. Pada waktu bulan Oktober 2023 lalu, Satgas Indobatt UNIFIL terdadak dan harus membuat rencana kontigensi ketika Staf Ops Mabes TNI meminta hal tersebut.

Dinamika situasi lain juga telah terjadi bahwa Satgas RDB MONUSCO pada Mei 2023 lalu mendapatkan FRAGO (*Fragmentary Order*) untuk melaksanakan Operasi Manzobe (operasi pembersihan milisi ADF) di Kongo. Pola operasi yang diterapkan pada Operasi Manzobe adalah *offensive* (mencari dan membersihkan milisi). Hal tersebut juga tidak sesuai dengan UN *Mandate* pada poin imparial maupun tidak menggunakan kekuatan bersenjata kecuali untuk mempertahankan diri atau mempertahankan mandat.

Hal di atas tidak sejalan dengan Teori Perdamaian menurut John Galtung tentang tahapan pendekatan/penanganan dalam mencapai perdamaian yaitu *peacemaking, peacekeeping, peacebuilding* (Galtung, 1976). Hal ini merupakan temuan yang sama pada saat latihan PDT. Begitu juga tidak selaras dengan hasil penelitian Charles T. Hunt dan Shannon Zimmerman tentang *The Impacts of UN Security Council Approaches to Tackling Terror on the Pursuit of Peace* dan *Securing the Future* (Zimmerman, 2022), dimana Satgas RDB MONUSCO seharusnya menerima *robust of mandate* (penguatan mandat) terkait perintah pelaksanaan Operasi Manzobe yang bisa dikategorikan dalam upaya *Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE)*, sembari mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip perdamaian yang mendasar.

Dengan demikian, upaya PBB dapat lebih efektif dalam mengatasi terorisme dan ekstremisme kekerasan dengan tetap menjaga integritas dan tujuan operasi perdamaian di negara Kongo.

Berdasarkan fenomena di atas, maka seharusnya PMPP TNI tidak boleh mengesampingkan *update* perkembangan situasi di daerah misi dalam pemberian materi saat latihan PDT, dengan argumen berpegang teguh pada mandat misi. Dalam hal ini materi tentang *counter terrorism* baik *knowledge* maupun *practice*. *Knowledge* yang bersifat *soft skill* seperti manajemen konflik penanganan terorisme, pengetahuan intelijen daerah misi, dan penggalangan yang dapat digunakan dalam merangkul para milisi (*armed group*), serta *practice* yang bersifat *hard skill* seperti *close combat tactical/PJD* (pertempuran jarak dekat) dan *urban warfare* dalam mendukung materi OLI maupun patroli untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan militer prajurit untuk melindungi diri maupun masyarakat sipil.

ir

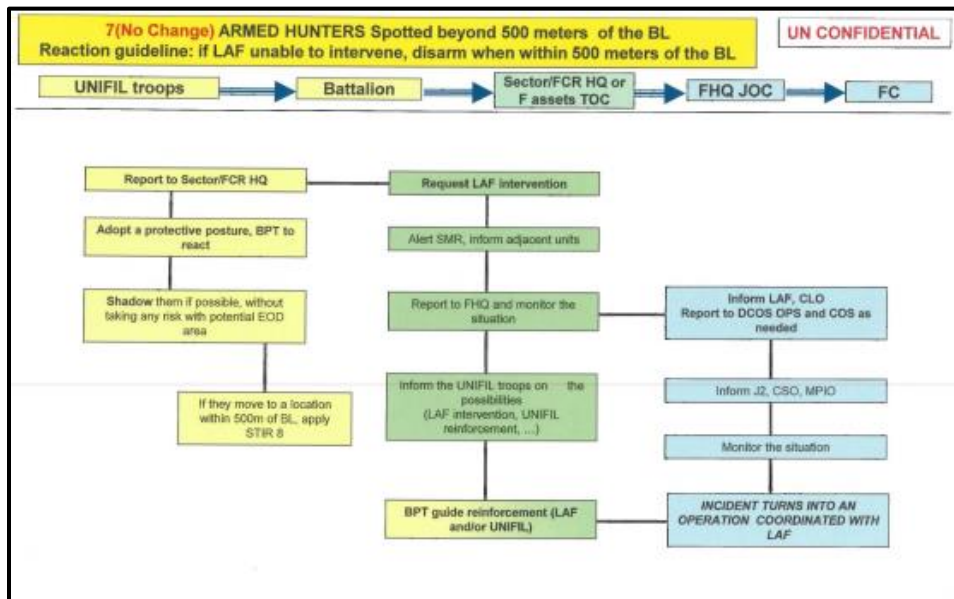
### c. **Aturan yang berlaku.**

Dari temuan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa ketidaksesuaian aturan yang dapat diidentifikasi, salah satunya adalah adanya ketidaksinkronan antara mandat dan pelaksanaan tugas di lapangan serta *Standardized Tactical Incident Reaction* (STIR) yang tidak *update*. Mandat adalah suatu dokumen hukum yang dirumuskan melalui proses politik, disetujui oleh PBB dan negara tuan rumah. Dokumen ini membentuk dasar operasi perdamaian dan memberikan otoritas hukum pada pelaksanaan operasi tersebut. Mandat ini mencakup *Rules of Engagement* (ROE) yang memberikan wewenang bagi angkatan bersenjata untuk menggunakan kekerasan. ROE ini memberikan gambaran mengenai syarat-syarat dan batasan-batasan mengenai kapan pasukan perdamaian diizinkan untuk memulai atau melanjutkan keterlibatan

mereka dalam pertempuran ketika menghadapi ancaman. Dalam hal ini telah dibahas di atas terkait *robust of mandate* (penguatan mandat) yang dikorelasikan dengan *update* perkembangan situasi di daerah misi dalam menjalankan tugas misi perdamaian.

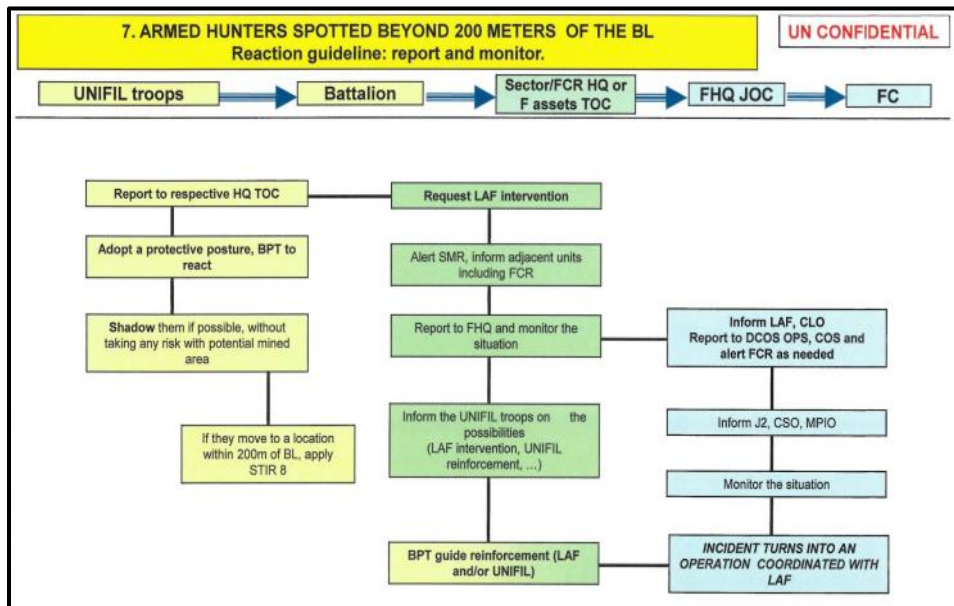
Hal tersebut juga tidak sejalan dengan teori terorisme yang didalamnya memuat Hukum Internasional yang telah berupaya untuk mengatur tindakan terorisme melalui sejumlah konvensi dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Upaya ini mencakup perumusan definisi terorisme, penentuan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan teroris, dan penetapan mekanisme kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Pada tahun 2016 Dewan Keamanan PBB mengesahkan *United Nations Security Council Resolution 2295* sebagai penguatan mandat untuk misi multidimensional.

*Standardized Tactical Incident Reaction (STIR)* adalah perpanjangan dari ROE yang memuat tentang prosedur yang harus dilaksanakan oleh *peacekeeper* apabila mendapatkan insiden atau menemukan hal-hal yang menonjol terhadap pelaksanaan tugas di lapangan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh saat latihan PDT, akibat kurangnya informasi mengenai *update* situasi di lapangan, sehingga pada saat latihan aplikasi STIR bersifat kaku atau tidak fleksibel. Hal ini dilaksanakan agar para peserta latihan menguasai pentahapan dalam STIR di setiap daerah misi. Namun di sisi lain terdapat perbedaan STIR yang diajarkan oleh pelatih saat PDT dengan STIR terbaru yang berlaku di daerah misi. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi tentang *sharing* informasi antara pelatih di PMPP TNI dengan personel terkait yang sedang melaksanakan misi. Sebagai contoh STIR tentang penanganan pemburu bersenjata, di dalam STIR dijelaskan bahwa apabila terdapat pemburu yang berada pada jarak 500 meter dari *Blue Line* (masih berdasarkan STIR lama jarak 500 meter padahal pada STIR yang baru pada jarak 200 meter).



Gambar 4.6.1.2. STIR versi lama (V28)

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)



Gambar 4.6.1.3. STIR versi terbaru (V31)

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Berdasarkan fenomena di atas, maka seharusnya PMPP TNI membuka diri dan selalu berkomunikasi dengan jajaran personel

yang sedang melaksanakan misi terkait *update* perkembangan situasi di daerah misi, agar dalam pemberian materi saat latihan PDT selalu *terupdate* terutama apabila ada perubahan aturan maupun kebijakan *Head of Mission* di daerah misi masing-masing. Hal ini dilakukan agar para *peacekeeper* selanjutnya (pengganti) tidak terjadi keraguan untuk bertindak di lapangan sehingga insiden dan pelanggaran aturan dapat diminimalisir serta pengamanan akan keselamatan diri pasukan menjadi lebih terjamin.

#### **4.6.2. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dan Amerika Serikat dengan *promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations*.**

##### **a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan militer pasukan dalam melindungi diri dan masyarakat sipil.**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat prajurit yang masih belum menguasai medan operasi di daerah misi dan kesalahan dalam penggunaan aplikasi *map online*, ditambah lagi dengan kemampuan bahasa yang lemah baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab, sehingga hal tersebut menghambat komunikasi dan tidak jarang menyebabkan beberapa kejadian/ insiden seperti salah masuk rute patroli dan kecelakaan kendaraan. Dan kemampuan bahasa anggota yang terbatas tersebut juga menjadi salah satu penyebab kurangnya *soft skill* dalam pola pendekatan ke masyarakat lokal dalam kegiatan CIMIC. Termasuk materi lain yang seharusnya diperdalam dan diperbanyak prakteknya seperti kemampuan mengendarai panser atau APC di berbagai medan, namun hanya dilaksanakan dalam jangka waktu seminggu saat latihan aplikasi.

Hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya materi yang harus diberikan oleh pelatih kepada peserta latihan, dihadapkan dengan

ketersediaan waktu yang singkat yaitu 1 bulan latihan dan daya tangkap prajurit rata-rata. Diharapkan hasil *out put* latihan yang tercapaipun kurang maksimal, dan hal ini yang menyebabkan para *peacekeeper* ambigu atau terjadi keraguan untuk bertindak di lapangan.

Realita tersebut jelas tidak sejalan dengan Teori Kesiapan (Yusnawati, 2007) dan (Slameto, 2010), dimana kesiapan merupakan suatu kondisi dimana seseorang telah mencapai pada tahapan tertentu atau dikonotasikan dengan kematangan fisik, mental, psikologis, dan *skill* yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban cara tertentu terhadap suatu situasi.

Di sisi lain dengan terdapatnya konsensus di PBB bahwa Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB bukan merupakan alat yang tepat untuk operasi *counter terrorism* karena tidak termasuk dalam mandat misi yang berfokus pada perlindungan sipil dan restorasi perdamaian. Namun diharapkan pasukan Garuda memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam melindungi diri dan masyarakat sipil (POC) dari ancaman kelompok teroris. Berdasarkan hasil penelitian terutama satuan tugas yang di tempatkan di Afrika baik MINUSCA maupun MONUSCO tidak menutup kemungkinan akan selalu terjadi perubahan situasi terkait ancaman teroris seperti dari kelompok ADF di Kongo.

PMPP TNI diharapkan dapat memberikan materi baik *soft skill* maupun *hard skill* untuk pengembangan kapasitas dan meningkatkan keahlian pasukan untuk membela diri kiranya ada ancaman. Materi yang diberikan tentunya mempertimbangkan dampak terhadap misi pemeliharaan perdamaian secara keseluruhan dan harus selaras dengan kebijakan internasional serta peraturan PBB yang mengatur misi tersebut (penguatan mandat maupun perubahan resolusi UN), sehingga tidak ada keraguan bagi setiap prajurit dalam mengambil tindakan di lapangan, dengan tujuan

agar tidak tersangkut hukum nantinya.

Berdasarkan fenomena di atas, maka latihan PDT yang diselenggarakan oleh PMPP TNI diharapkan menghasilkan *out put* pasukan Garuda yang menguasai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sesuai pencapaian sasaran latihan, sehingga tidak terjadi keraguan lagi oleh setiap *peacekeeper* Indonesia untuk bertindak di lapangan untuk meminimalisir insiden, pelanggaran aturan, dan menjamin keselamatan diri pasukan sendiri. Begitu pula dengan tugas POC akan terlaksana lebih baik, dimana bermuara pada keberhasilan tugas dan akhirnya tertuju pada nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional.

**b. Memperat hubungan diplomatik dan persahabatan antara Amerika Serikat dan Indonesia.**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diinformasikan bahwa hubungan kerja sama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berlanjut secara teratur dengan penyelenggaraan kursus GPOI (*Global Peace Operation Initiative*) di PMPP TNI, bahkan saat ini juga adanya kursus tambahan seperti POC (*Protection of Civilian*) dan WPS (*Woman, Peace and Security*) dari negara Australia maupun Inggris. Dalam latihan PDT pun selalu mengundang narasumber dari perwakilan negara Amerika saat pembekalan materi ICRC (*International Committee of Red Cross*). Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan hubungan diplomatik dan persahabatan yang semakin baik dalam kerja sama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Hal tersebut sudah sesuai dengan teori kerja sama K.J Holsti dimana dalam konteks hubungan internasional, suatu kerja sama melibatkan partisipasi dua negara yang berbeda atau institusi dari dua negara tersebut untuk mengatur kepentingan dari kedua belah pihak (Holsti, 1988). Oleh karena itu, negara dalam melakukan

sebuah kerja sama akan dimotivasi untuk mengarahkan kebijakan luar negerinya demi kepentingan nasional yang ingin dicapainya. Kerja sama tersebut tentunya dapat terwujud karena memiliki dasar kepentingan yang sama dan bekerja dengan prinsip yang saling menguntungkan.

Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keuntungan kerja sama militer dalam penyiapan dan pelatihan *peacekeeper* yang diselenggarakan oleh PMPP TNI adalah dapat mempererat hubungan diplomatik dan persahabatan baik antara negara Indonesia dan Amerika Serikat maupun secara personal antara peserta latihan yang berasal dari berbagai negara.





Gambar 4.6.2.1. Kursus POC dan WPS di PMPP TNI

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2022)